# TAHUN 2024

# LAPORAN KINERJA (LAKIN)

## KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

# KATA PENGANTAR

Sumber dana pembangunan diperoleh dari kekayaan alam dan rakyat. Pemerintah berupaya memaksimalkan pembangunan daerah dengan meningkatkan pembangunan secara masif dan terus menerus. Oleh karena itu sejak era reformasi bergulir paradigma pembangunan di Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Mencermati perkembangan tersebut, pemerintah berusaha menyusun sistem kerja yang transparan, jelas dan, legitimate sehingga penyelenggaraan negara diharapkan berhasil serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan itu dikeluarkanlah Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 yang memuat Azas Penyelenggara Negara menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pelaksanaan kerja mengacu pada asas akuntabilitas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka setiap instansi pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas diharuskan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah dalam bentuk media pertanggungjawaban secara kelembagaan. Dengan demikian diharapkan akan tercipta pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Palembang, 25 Januari 2025
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Syarifuddin Syafri

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi..... ii

Bab I Pendahuluan ..... 1

Bab II Perencanaan Kinerja ..... 9

Bab III Akuntabilitas Kinerja ..... 18

Bab IV Penutup ..... 130

Lampiran ..... 131

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja ( LAKIN ) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyajikan ikhtisar capaian kinerja tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor nomor 1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024

Penyusunan LAKIN ini sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian target Tahun Anggaran 2024. LAKIN mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menuju terwujudnya *good governance*, sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, serta LAKIN merupakan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi.

## B. TUGAS, STRUKTUR, DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kecamatan Jakabaring, dan Kecamatan Kertapati.

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
m. pemutakhiran basis data perpajakan;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi KPP Pratama.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 60, Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib

Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**Visi :**

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik yang melayani, membantu, dan menuntun Wajib Pajak dengan adil.

**Misi :**

1. Memberikan 3 M (Melayani, Menuntun, dan Membantu) demi terciptanya kepatuhan pajak yang tinggi.
2. Memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak demi mewujudkan pajak yang berkeadilan.
3. Membentuk aparatur pajak yang berintegritas, bermartabat, dan profesional.

**Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

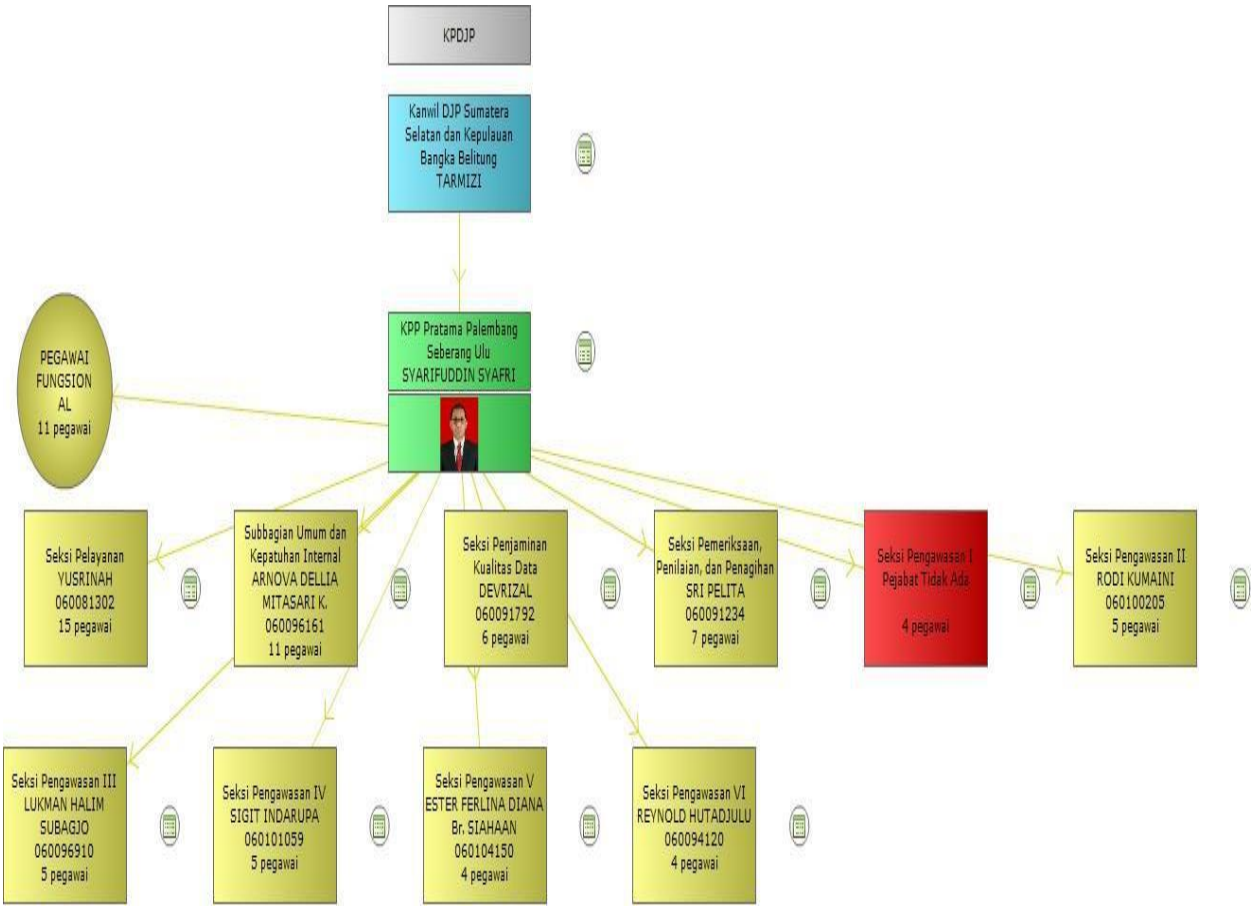


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
5. Seksi Pengawasan :
    a. Seksi Pengawasan I
    b. Seksi Pengawasan II
    c. Seksi Pengawasan III
    d. Seksi Pengawasan IV
    e. Seksi Pengawasan V
    f. Seksi Pengawasan VI
6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Sumber Daya Manusia**

Untuk menciptakan Institusi yang *good governance*, terhadap para pegawai diterapkan kode etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh para pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik ini diawasi oleh komite kode etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Aspek Kepegawaian yang mendukung operasional KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat digambarkan sebagai berikut :

**Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

Pegawai wanita = 35 orang, Pegawai pria = 40 orang
Total = 75 orang

**Distibusi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan**

**Tabel distribusi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan**

| Golongan | Jumlah |
|---|---|
| IV | 9 |
| III | 36 |
| II | 30 |
| Jumlah | 75 |

**Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan**

**Tabel distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan**

| Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Kantor | 1 |
| Kasi / Kasubbag | 10 |
| Account Representative | 22 |
| Fungsional Pemeriksa | 6 |
| Penilai | 1 |
| Fungsional Penyuluh | 4 |
| Bendaharawan | 1 |
| Sekretaris | 1 |
| Juru Sita | 2 |
| Pelaksana | 27 |
| Jumlah | 75 |

**Peran Strategis KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

Pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Palembang seberang Ulu didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peranan 39.43% dari penerimaan; Industri Pengolahan yang memiliki peranan 31.56% dari penerimaan; Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib yang memiliki peranan 9,47% dari penerimaan; Transportasi dan Pergudangan yang memiliki peranan 5,13% dari penerimaan; dan Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peranan 3,77% dari penerimaan.

Lima (5) Sektor Dominan Penerimaan tersebut memberikan dampak besar pada penerimaan pajak sehingga KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat berhasil mencapai target realisasi penerimaan Pajak melebihi 100% selama 8 (delapan) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak (WP) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Banyak WP yang tidak melakukan pemutakhiran data profil seperti pindah alamat dan mengganti nomor telepon. Penurunan setoran WP UMKM yang merupakan dampak dari implementasi UU HPP No. 7 Tahun 2021 juga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

**Kedudukan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu sebagai salah satu unit Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkup Kementerian Keuangan dan merupakan salah satu unit vertikal dibawah Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang 30264. Terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) Kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Jakabaring terdiri dari :
   Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9/10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, dan Kelurahan Tuan Kentang
2. Kecamatan Plaju terdiri dari :
   Kelurahan Bagus Kuning, Kelurahan Komperta, Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Plaju Ulu, Kelurahan Talang Bubuk, dan Kelurahan Talang Putri.
3. Kecamatan Kertapati terdiri dari :
   Kelurahan Kertapati, Kelurahan Karya Jaya, Kelurahan Kemang Agung, Kelurahan Kemas Rindo, Kelurahan Keramasan, dan Kelurahan Ogan Baru.
4. Kecamatan Seberang Ulu I terdiri dari :
   Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan 2 Ulu, Kelurahan 3/4 Ulu, Kelurahan 5 Ulu, dan Kelurahan 7 Ulu.
5. Kecamatan Seberang Ulu II terdiri dari :
   Kelurahan 11 Ulu, Kelurahan 12 Ulu, Kelurahan 13 Ulu, Kelurahan 14 Ulu, Kelurahan 16 Ulu, Kelurahan Sentosa, dan Kelurahan Tangga Takat.

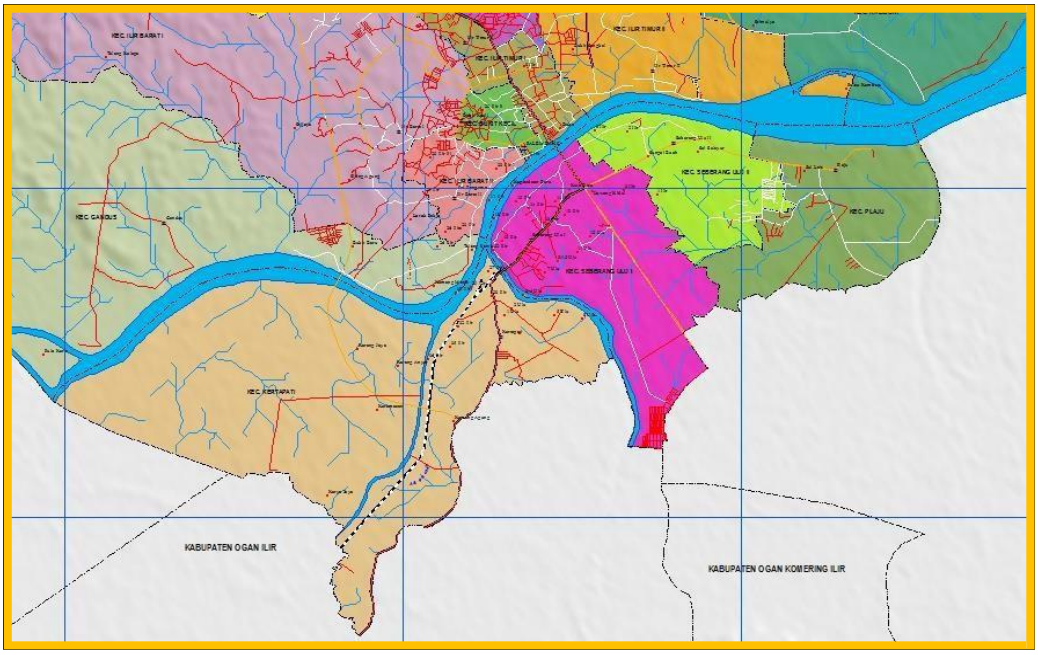


## C. SISTEMATIKA LAPORAN

Ada pun Sistematika Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Daftar isi
2. Kata Pengantar
3. Pendahuluan
4. Perencanaan Kinerja
5. Akuntabilitas Kinerja
6. Penutup

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah :
    a. Organisasi dan SDM yang optimal
    b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
    c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

| No | Nama IKU Pada Renstra DJP 2020-2024 | Target | | | | | UIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PP1, PP2 |
| 2 | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Seluruh Unit |
| 3 | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EP, Gakum |
| 4 | Indeks kepuasan publik atas layanan DJP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | P2Humas |
| 5 | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK | 1.97 | 11.99 | 48.05 | 87.83 | 100.00 | TIK, TPB |
| 6 | Indeks persepsi integritas pegawai | 80.00 | 82.50 | 85.00 | 87.50 | 90.00 | KITSDA |

| No | Nama Indikator pada Renja DJP 2024 | Target | UIC |
|---|---|---|---|
| | | 2024 | |
| 1 | Persentase realisasi penerimaan negara | 100 | Seluruh Unit |
| 2 | Indeks Efektivitas Insentif Fiskal – DJP | 100 | PP1 |
| 3 | Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi | 90 | EP, PKP , Kanwil , KPP |
| 4 | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum Perpajakan | 100 | EP, Gakkum |
| 5 | Nilai Kinerja regulasi | 85 | PP1 , PP2, PI |
| 6 | Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak | 100 | PP1 , PP2, PI |
| 7 | Indeks kepuasan publik atas layanan DJP | 82 | P2Humas, Kanwil |
| 8 | Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan | 81 | P2Humas, Kanwil |
| 9 | Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak | 45 | DKB |
| 10 | Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas | 100 | PP1 , PP2, PI |
| 11 | Indeks Efektivitas Peraturan | 75 | PP1 , PP2, PI |
| 12 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95.5 | Seluruh Unit |
| 13 | Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100 | Sesditjen |
| 14 | Tingkat kualitas pengelolaan SDM | 100 | KITSDA, Kanwil, KPP |
| 15 | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 89 | P2Humas, Kanwil |
| 16 | Tingkat Downtime Sistem TIK | 0.1 | TIK |
| 17 | Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK (Core tax administration system) | 96 | TIK, TPB |
| 18 | Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal | 82 | KITSDA |

# RINCIAN TARGET KINERJA
# KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
# PALEMBANG SEBERANG ULU
# KEMENTERIAN KEUANGAN
# TAHUN 2024

| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | |
| 01a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 26% | 53% | 53% | 81% | 81% | 100% | 100% |
| 01b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | |
| 02a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 26% | 53% | 53% | 81% | 81% | 100% | 100% |
| 02b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | |
| 03a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | |
| 04a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 10% | 40% | 40% | 60% | 60% | 74% | 74% |
| 04b-N | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | 85% | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang Efektif | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | |

| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06b-N | Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | |
| 07a-CP | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 07b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 75% | 75% |
| 07c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | | | | | | | |
| 08a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 08b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 09a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | - | - | - | 85 (skala 100) | 85 (skala 100) | 85 (skala 100) | 85 (skala 100) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09c-N | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 23 | 47 | 47 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, sebagai berikut:

# PERJANJIAN KINERJA
# NOMOR: PK-3/WPJ.03/2024
# KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
# KEMENTERIAN KEUANGAN
# TAHUN 2024

## Peta Strategi

**Visi :**

**Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".**

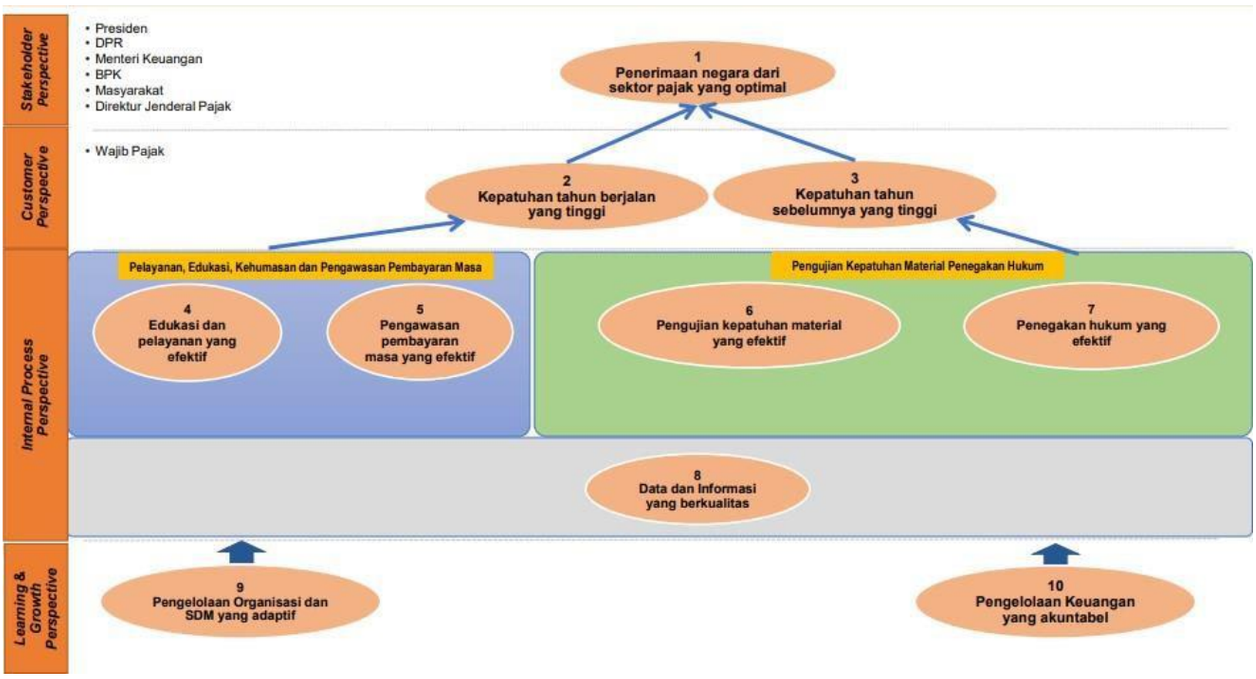

# PERJANJIAN KINERJA
# TAHUN 2024
# KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
# PALEMBANG SEBERANG ULU
# KEMENTERIAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang Efektif | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | 100% |
| | | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100% |
| | | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| | | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% |
| | | 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 |
| | | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| | | 09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

| **Program/ Kegiatan Tahun 2024** | | **Anggaran** |
|---|---|---|
| *A.* Program Pengelolaan Penerimaan Negara | Rp | 827.465.000 |
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara | Rp | 341.949.000 |
| 2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp | 140.069.000 |
| 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum | Rp | 345.447.000 |
| *B.* Program Dukungan Manajemen | Rp | 3.963.848.000 |
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp | 3.324.063.000 |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp | 639.785.000 |
| **Total** | **Rp** | **4.791.313.000** |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

**NILAI KINERJA ORGANISASI**
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
**KPP KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**
**TAHUN 2024**

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Stakeholder Perspective* | | | | | | 30,00% | 103,68 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | 103,68 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100,54% | Max | E/L | 26,00% | 57,78% | 100,54 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | 107,98 | Max | P/L | 19,00% | 42,22% | 107,98 |
| | *Customer Perspective* | | | | | | 20,00% | 104,54 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | 105,39 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,43% | Max | E/L | 26,00% | 57,78% | 100,43 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 112,17% | Max | P/L | 19,00% | 42,22% | 112,17 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | 103,68 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 103,68% | Max | E/M | 21,00% | 100,00% | 103,68 |
| | *Internal Process Perspective* | | | | | | 25,00% | 117,66 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | 116,19 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 88,80% | Max | E/M | 21,00% | 50,00% | 120,00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100,00% | 112,38% | Max | E/M | 21,00% | 50,00% | 112,38 |
| 5 | Persentase pengawasan pembayaran masa | | | | | | | 120,00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00% | 115,80% | Max | P/M | 14,00% | 100,00% | 120,00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | 119,43 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 120,00 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 120,00 |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% | 118,31% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 118,31 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | 112,69 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 26,92% | 120,00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75,00% | 102,09% | Max | P/L | 19,00% | 36,54% | 120,00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% | 100,00% | Max | P/L | 19,00% | 36,54% | 100,00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | 120,00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 42,42% | 120,00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% | 83,20% | Max | P/L | 19,00% | 57,58% | 120,00 |
| | *Learning & Growth Perspective* | | | | | | 25,00% | 116,71 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 113,42 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100,00 | 117,47 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 117,47 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00 | 94,97 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 111,72 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90,00 | 100,00 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 111,11 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | 120,00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120,00 | Max | P/M | 14,00% | 100,00% | 120,00 |
| | Nilai Kinerja Organisasi | | | | | | | 110,61 |

*Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB*

## SASARAN STRATEGIS (SS) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

## KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 01b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 02a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | 02b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 03a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 04a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 04b-N | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 05a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 06a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 06b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% |
| | | 06c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | 07a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% |
| | | 07b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| | | 07c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | 08a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% |
| | | 08b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari IL AP **) | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 |
| | | 09b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| | | 09c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

**Unit Organisasi : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**
**Tahun Anggaran : 2024**

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100,54% | 100,54% |
| | | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 | 107,98 | 107,98 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | 100,43% | 100,43% |
| | | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% | 112,17% | 112,17% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% | 103,68% | 103,68% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% | 88,80% | 120,00% |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% | 112,38% | 112,38% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | 115,80% | 120,00% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | 120,00% | 120,00% |
| | | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% | 119,44% | 119,44% |
| | | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% | 118,31% | 118,31% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% | 120,00% | 120,00% |
| | | Tingkat efektivitas penagihan | 75% | 102,09% | 120,00% |
| | | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% | 100,00% | 100,00% |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% | 120,00% | 120,00% |
| | | Persentase penghimpunan data r egional dari ILAP **) | 55% | 83,20% | 120,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 | 117,47 | 117,47 |
| | | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 | 94,97 | 111,73 |
| | | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 | 100,00 | 111,11 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 120,00 | 120,00 |

**Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2024** **Rp 5.495.345.000**

**Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024** **Rp 5.217.923.663**

# A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

| | | |
|---|---|---|
| **01a-CP** | : | Persentase realisasi penerimaan pajak |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **26%** | **53%** | **53%** | **81%** | **81%** | **100%** | **100%** |
| **Realisasi** | **32,83%** | **58,26%** | **58,26%** | **80,70%** | **80,70%** | **100,54%** | **100,54%** |
| **Capaian (Max 120)** | **120,00%** | **109,92%** | **109,92%** | **99,63%** | **99,63%** | **100,54%** | **100,54%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**
  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
  Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
  arget penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.
  Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

| | |
|---|---|
| **Realisasi penerimaan pajak** | **x 100%** |
| **Target penerimaan pajak** | |

- **Realisasi IKU**

**Kinerja Penerimaan**

TAHUN 2024 BULAN Januari SAMPAI Desember UNIT KPP Se-KANWIL URUT Pertumbuhan Bruto Perhitungan Total Lihat Data

DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN

| No. | KANWIL/KPP | TARGET | PENERIMAAN TAHUN BERJALAN | | | | | | | | PENERIMAAN TAHUN LALU | | PENCAPAIAN | PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MPN | DOLLAR | SPM | PBK KIRIM | PBK TERIMA | BRUTO | SPMKP | NETTO | BRUTO | NETTO | | BRUTO | NETTO |
| 1 | PRATAMA LUBUK LINGGAU | 986,190,701,000 | 958,320,239,048 | 0 | 39,830,457,303 | -7,748,873,356 | 7,606,431,302 | 998,008,254,297 | 2,247,594,566 | 995,760,659,731 | 788,167,002,965 | 787,616,253,014 | 100.97 | 26.62 | 26.43 |
| 2 | PRATAMA LAHAT | 1,417,857,360,000 | 1,404,895,595,701 | 0 | 32,620,076,605 | -13,217,065,361 | 8,726,546,286 | 1,433,025,153,231 | 1,473,849,604 | 1,431,549,303,627 | 1,382,190,000,621 | 1,171,755,781,976 | 100.97 | 21.22 | 22.17 |
| 3 | PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU | 842,849,011,000 | 802,181,387,811 | 0 | 53,222,739,811 | -2,849,657,248 | 2,585,084,263 | 855,139,554,637 | 7,765,508,716 | 847,376,045,921 | 716,279,889,807 | 712,137,639,481 | 100.54 | 19.39 | 18.99 |
| 4 | PRATAMA BATURAJA | 626,501,076,000 | 640,632,662,453 | 0 | 18,379,064,310 | -14,121,206,345 | 14,163,651,946 | 659,054,172,364 | 25,415,840,061 | 633,638,332,303 | 559,115,012,923 | 521,710,175,600 | 101.14 | 17.87 | 21.45 |
| 5 | PRATAMA SEKAYU | 1,873,521,267,000 | 1,852,565,092,072 | 0 | 51,806,837,736 | -21,685,197,496 | 19,313,213,195 | 1,901,999,945,507 | 19,212,284,217 | 1,882,787,661,290 | 1,616,974,516,891 | 1,608,309,448,703 | 100.49 | 17.63 | 17.07 |
| 6 | PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR | 2,312,894,150,000 | 2,207,087,184,384 | 0 | 201,511,463,334 | -10,888,126,251 | 12,069,673,102 | 2,409,780,184,569 | 90,440,909,167 | 2,319,339,285,402 | 2,053,374,626,389 | 2,010,490,247,642 | 100.28 | 17.36 | 15.36 |
| 7 | PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT | 1,846,945,402,000 | 1,263,371,759,584 | 7,924,629,607 | 614,745,160,244 | -12,579,395,149 | 13,533,018,196 | 1,886,995,172,682 | 27,533,246,423 | 1,859,461,926,259 | 1,649,500,685,718 | 1,628,980,055,473 | 100.68 | 14.4 | 14.15 |
| 8 | PRATAMA KAYU AGUNG | 917,777,141,000 | 918,665,959,531 | 0 | 29,519,425,721 | -7,013,724,541 | 7,175,051,703 | 948,346,712,414 | 24,792,268,938 | 923,554,443,476 | 860,036,881,316 | 857,024,635,087 | 100.63 | 10.27 | 7.76 |
| 9 | PRATAMA TANJUNG PANDAN | 584,160,791,000 | 609,936,425,677 | 0 | 19,976,356,282 | -8,643,270,410 | 8,666,311,707 | 629,925,823,256 | 43,163,766,433 | 586,762,056,823 | 586,316,201,016 | 562,025,139,895 | 100.45 | 7.44 | 4.4 |
| 10 | PRATAMA BANGKA | 1,773,459,420,000 | 1,768,292,950,076 | 0 | 73,665,067,155 | -14,728,106,199 | 14,404,589,157 | 1,841,634,500,189 | 48,887,897,293 | 1,792,746,602,896 | 1,754,791,327,284 | 1,579,173,654,642 | 101.09 | 4.95 | 13.52 |
| 11 | PRATAMA PRABUMULIH | 2,718,543,960,000 | 2,461,630,107,301 | 0 | 286,612,068,381 | -7,873,872,776 | 7,946,860,420 | 2,748,315,103,326 | 20,798,993,410 | 2,727,516,109,916 | 2,767,966,253,594 | 2,652,004,437,046 | 100.33 | -.71 | 2.85 |
| 12 | MADYA PALEMBANG | 6,200,511,947,000 | 7,449,701,051,317 | 35,241,720,589 | 74,349,414,911 | -83,415,138,353 | 93,085,345,582 | 7,568,962,394,046 | 1,368,347,856,005 | 6,200,614,538,041 | 7,757,197,109,472 | 6,548,246,759,677 | 100 | -2.43 | -5.31 |
| 13 | PRATAMA PANGKAL PINANG | 1,090,480,456,000 | 1,125,860,296,510 | 0 | 86,477,575,985 | -7,957,550,158 | 8,167,642,854 | 1,212,567,965,191 | 120,258,959,217 | 1,092,309,005,974 | 1,325,986,198,358 | 1,185,233,401,955 | 100.17 | -8.55 | -7.84 |
| | Jumlah | 23,191,692,682,000 | 23,463,128,711,465 | 43,166,350,196 | 1,582,715,707,778 | -212,701,183,643 | 217,443,419,913 | 25,093,753,005,709 | 1,800,336,974,050 | 23,293,416,031,659 | 23,617,895,706,354 | 21,824,707,610,191 | 100.44 | 6.25 | 6.73 |

-


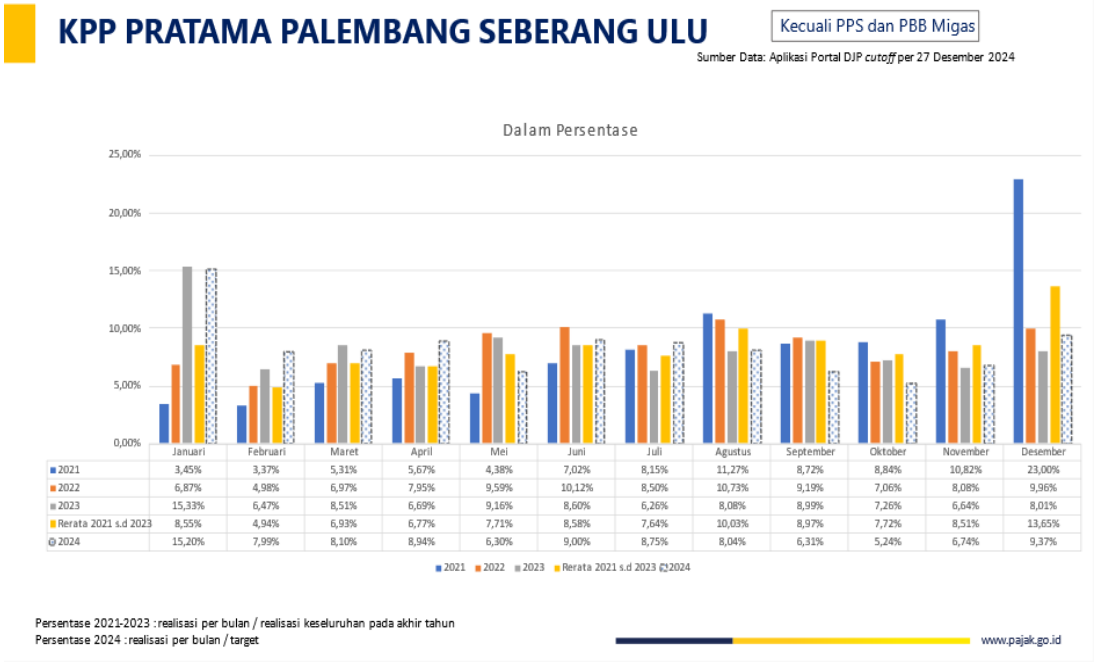

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 103,57% | 101,51% | 112,76% | 104,63% | 100,54% |

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase Realisasi Penerimaan Pajak | 100% | - | 100% | 100,54% |

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif, PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase Realisasi Penerimaan Pajak | 100% | 100% | 100,54% |

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-

19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
c. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
f. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.
h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

   Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

   1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
   2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
   3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
   4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian
   5) Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
   6) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

   Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat ` beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain

   1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
   2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
   3) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
   4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:**

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
e. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama
  c. penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| A. Melakukan imbauan kepada Wajib Pajak yang tidak dan/atau melakukan pembayaran di tahun berjalan | Tahun 2025 |
| B. Monitoring Wajib Pajak yang sudah tidak aktif dengan output Dafnom Usulan NE | |
| C. Penyelenggaraan kegiatan Focus Group DIscussion (FGD) penggalian potensi yang masih belum tergali | |
| A. Pengamanan PPM Jenis Pajak yang menjadi penopang penerimaan KPP (PPh Pasal 25, PPh Final 4 ayat (2) PP 55, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Final Pasal 23/26, PPN dan PPN Impor, PPBB Sektor P5L), dengan melakukan : | |
| 1. Mencari Sumber baru Penerimaan PPM | |
| 2. Penerbitan Surat Teguran dan STP<br>a. Menerbitkan Surat Teguran terhadap WP yang belum melaporkan SPT Masa;<br>b. Menerbitkan STP atas WP yang terlambat/kurang/tidak bayar. | |
| 3 Pemeriksaan Data Konkret<br>Menindaklanjuti LHP2DK dalam pengawasan yang bersumber dari data konkret<br>misalnya Faktur Pajak atau Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) PP 55/2022 yang belum dilakukan pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) PP 55/2022. | |
| 4. Penyelenggaraan kegiatan Focus Group DIscussion (FGD) penggalian potensi yang masih belum tergali | |
| 5.Penyusunan strategi penggalian potensi perpajakan dengan mengoptimalkan PPM pada Wajib Pajak lain yang diproyeksikan tumbuh pada tahun berjalan | |
| 6. Melakukan *Tax Gathering* dengan para pembayar pajak penentu penerimaan | |
| 1. Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM Pengawasan melalui: | |
| a. Mempercepat Penerbitan dan penyelesaian SP2DK yang belum LHP2DK<br>b. Mendindaklajuti DPP Kolaboratif dengan prioritas WP yang mempeunyai Potensi besar dan *ability yo pay* yang tinggi. | |

| | |
|---|---|
| c. Menambah DPP mandatory melalui analisis mandiri<br>d. Melakukan penggalian potensi diluar Daftar Prioritas Pengawasan melalui *Wider Revenue Activity* (WRA). | |
| 2. Mempercepat tindaklanjut penyelesaian pemeriksan | |
| a. Melakukan koordinasi antara FPP, AR, dan Fungsional Penilai untuk penggalian potensi bersama | |
| 3. Melakukan Optimalisasi kegiatan penagihan melalui : | |
| a. Melakukan Tindakan Penagihan berupa soft collection dan hard collection (Teguran, Surat Paksa, Sita, Blokir dan Penjualan Barang Sitaan (Lelang) secara terukur dan berkesinambungan | |
| 4. Coaching dan pelatihan kepada pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan bahan baku penerimaan (Seksi Pengawasan dan Seksi PKD) untuk memastikan kualitas dan kuantitas data bahan baku penggalian | |
| 1. Melakukan Manajemen Restitusi melalui : | |
| a. Membuat Prognosis Restitusi setiap bulan dengan deviasi kurang dari 5% berdasarkan data SPT LB yang masuk baik yang meminta pengembalian pendahuluan maupun yang melalui pemeriksaan SPT LB | |
| b. Melakukan Pemeriksaan *Post Audit* atas Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan | |
| c. Melakukan Pemeriksaan secara professional agar hasil pemeriksaannya terdapat *Refund Discrepancy* | |
| d. Menyelesaikan proses Restitusi baik yang melalui pemeriksaan ataupun pengembalian pendahuluan sebelum jatuh tempo | |

| | | |
|---|---|---|
| **01b-CP** | : | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Realisasi** | 100,00% | 110,00% | 110,00% | 108,94% | 108,94% | 107,98% | 107,98% |
| **Capaian (Max 120)** | 100,00% | 110,00% | 110,00% | 108,94% | 108,94% | 107,98% | 107,98% |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing- masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

     Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

     Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

     Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

     Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak

yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

**Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =**

**(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)**

- **Realisasi IKU**

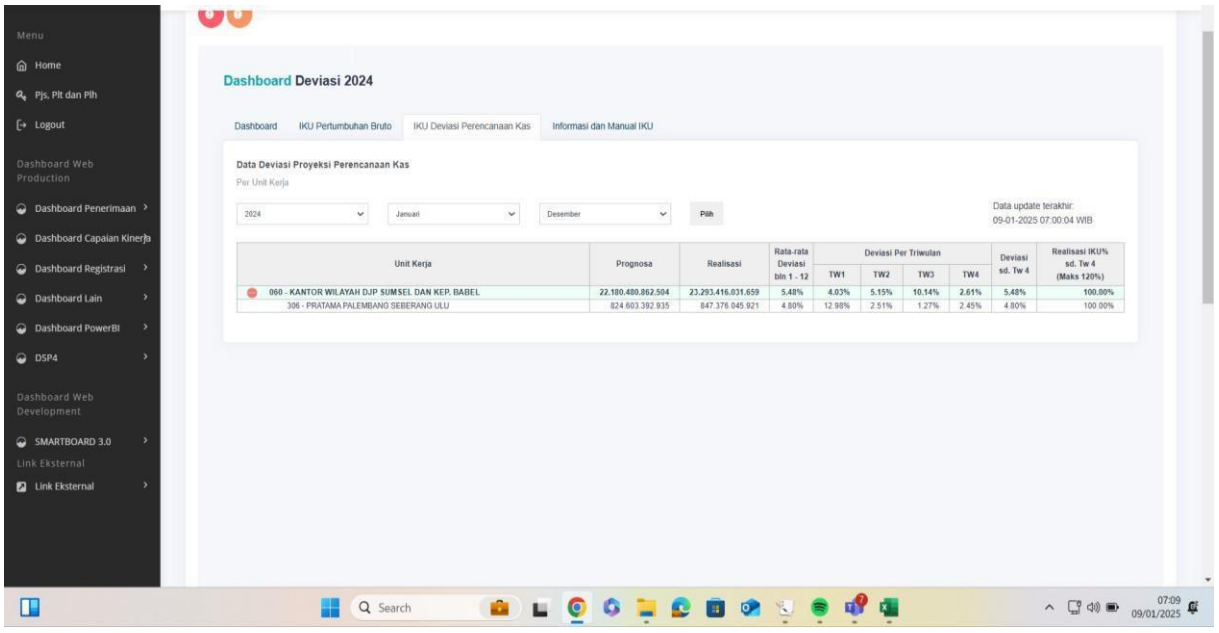


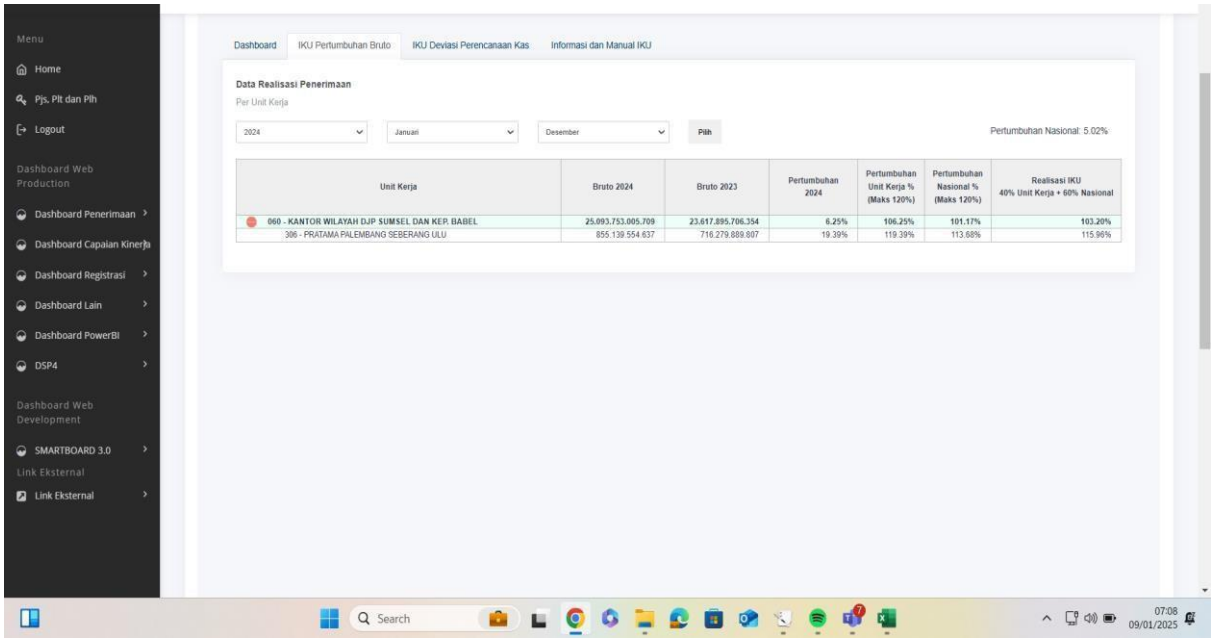

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | | | | 115,75% | 107,98% |

Realisasi capaian IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan sebelum tahun 2023 tidak ada karena sebelumnya IKU itu terpisah. Mulai dari tahun 2023, IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan ada. IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan dari tahun sebelumnya mengalami penurunan menjadi sebesar 107,98%.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan | - | - | 100% | 107,98% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan | 100% | - | 107,98% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama
c. penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| **1. Melakukan optimalisasi kegiatan penggalian potensi melalui PPM dan atau PKM atas :** | Tahun 2025 |
| a. Pengawasan terhadap WP Penentu Penerimaaan :<br>- Mengawasi pembayaran WP besar<br>- Pengawasan intensif terhadap rekanan WP Kilang Pertamina Internasional dan Pertamina Patra Niaga Indonesia | |
| b. Pengawasan terhadap WP Bendahara/Instansi Pemerintah/BUMN : mengumpulkan DIPA/DPA dan menghitung potensi berdasarkan tarif efektif; dan melakukan pemantauan data LPSE. | |
| c. Penelitian terhadap WP yang alami peningkatan peredaran usaha (dinamisasi) | |
| d. Penelitian terhadap WP yang alami penurunan pembayaran pajak (shortfall) | |
| e. Analisis angsuran masa dengan cara analisis naik turun peredaran usaha dikaitkan dengan kewajaran pembayaran pajaknya | |
| **2. Menambah basis penerimaan pajak baik melalui penambahan WP maupun nominal pembayaran atas :** | |
| a. Penggalian Potensi Mandiri berupa penelitian data Apportal dan data Faktur Pajak "000" serta penerbitan SP2DK data mandiri. | |
| b. Optimalisasi kegiatan DSE dan KPDL. | |
| 3. Membuat prognosa penerimaan dengan seakurat mungkin melalui penelitian secara detil terhadap kode billing yang terbentuk dan Faktur Pajak yang telah di approve sistem | |
| 4 Melakukan evalusi terhadap deviasi proyeksi bulanan setiap awal bulan | |

| | | |
|---|---|---|
| **02a-CP** | : | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **26%** | **53%** | **53%** | **81%** | **81%** | **100%** | **100%** |
| **Realisasi** | **31,41%** | **55,93%** | **55,93%** | **79,22%** | **79,22%** | **100,43%** | **100,43%** |
| **Capaian (Max 120)** | **120,00%** | **105,53%** | **105,53%** | **79,80%** | **79,80%** | **100,43%** | **100,43%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

| | |
|---|---|
| **Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM** | **x 100%** |
| **Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM** | |

- **Realisasi IKU**

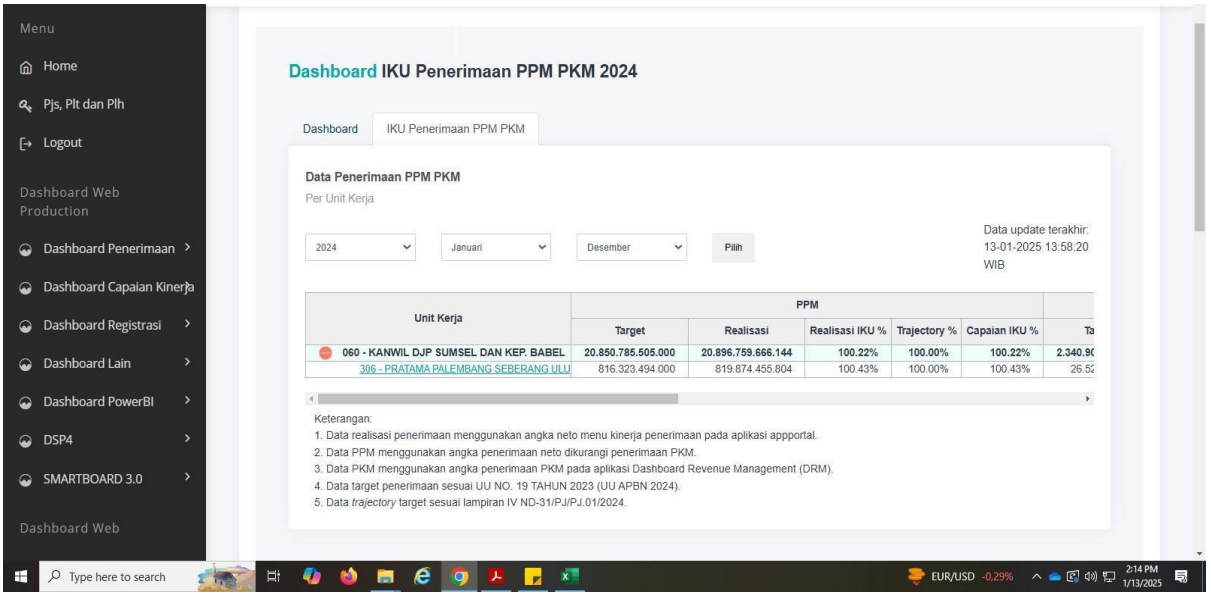


**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | | 101,74% | 113,32% | 104,73% | 100,43% |

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dari tahun sebelumnya mengalami penurunan menjadi sebesar 100,43%.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | - | 100% | 100,43% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | 100% | 100,43% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama
  c. penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Menyusun database dan daftar sasaran wajib pajak untuk dijadikan prioritas kegiatan pengawasan pembayaran masa, yang datanya bersumber dari: | Tahun 2025 |
| a. Data base Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran tahun 2024; | |
| b. Database DIPA Anggaran belanja instansi pemerintah pusat dan daerah tahun 2025; | |
| c. Database WP pembayar rutin PPh Potput, PPh 25 OP dan Badan, PPh Final serta PPN pemungut dan non pemungut. | |
| 1. Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa terhadap wajib pajak penentu penerimaan, dengan cara: | |
| a. Menyampaikan himbauan terhadap WP yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak masa Desember 2024 s.d. Februari 2025; | |
| b. Melakukan penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa Desember 2024 s.d. Februari 2025; | |
| c.Melakukan pengawasan kewajiban pelaporan SPT PPN; | |

| | |
|---|---|
| d. Meningkatkan penerbitan LHPt dan/atau SP2DK atas indikasi ketidakpatuhan wajib pajak selama masa pajak Desember 2024 s.d. Februari 2025 yang datanya bersumber dari: | |
| 1) Data pemicu dan data penguji yang ada di approweb; | |
| 2) Penerbitan Faktur Pajak yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN; | |
| 3) Analisa Mandiri lainnya. | |
| untuk kemudian dapat diterbitkan LHP2DK dan/atau usul pemeriksaan | |
| e. Melakukan pengawasan atas pembayaran PPh pasal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan. | |
| 1. Pengawasan potensi penurunan pembayaran pajak WP Besar (Terutama WP Badan Lainnya) | |
| 1. Mengoptimalkan pemanfaatan data internal dan eksternal: | |
| a. Data Appportal, Data Pemicu dan Penguji | |
| b. Data ILAP, IMB, Ijin Usaha UMKM, Data PPAT/Notaris, OSS (Online Single Submision). | |
| 1. Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan penggalian potensi beberapa sentra ekonomi : | |
| b, Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan | |

| | | |
|---|---|---|
| **2b-CP** | : | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **60,00%** | **80,00%** | **80,00%** | **90%** | **90%** | **100%** | **100%** |
| **Realisasi** | **89,72%** | **102,33%** | **102,33%** | **108,81%** | **108,81%** | **117,53%** | **117,53%** |
| **Capaian (Max 120)** | **120%** | **120%** | **120%** | **120%** | **120%** | **117,53%** | **117,53%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
     b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
  4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan

sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
    a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
    b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

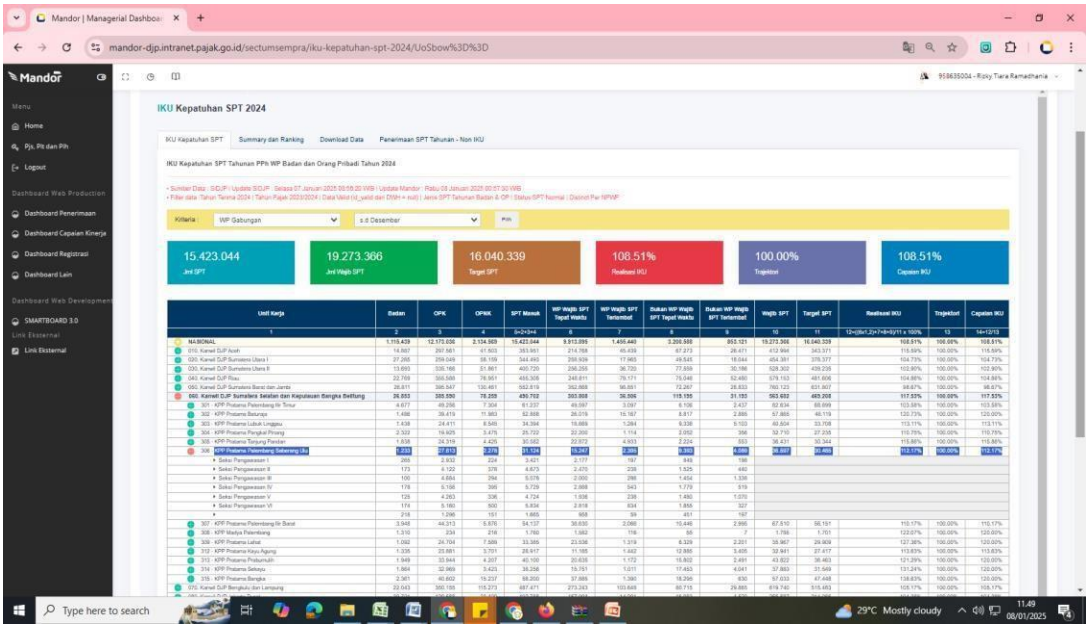


2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 102,47% | 103,39% | 101,85% | 104,73% | 117,53% |

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami kenaikan pesat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 117,53%.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | - | - | 100% | 117,53% |

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% | - | 117,53% |

5. **Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**
   - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

     Capaian atas kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

   a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
   b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
   c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak jika sudah memenuhi kewajiban eprpajak wajib melaporkan SPTnya.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Membentuk Tim satgas kepatuhan pelaporan spt yang melibatkan Fungsional Penyuluh dan seluruh AR | Tahun 2025 |
| 2. Menyusun mapping Wajib Pajak efektif sebagai daftar sasaran kepatuhan SPT Tahunan Jumlah WP efektif KPP PSU:<br>Badan = 2.496<br>OPNK = 8.557<br>OPK = 31.043<br>a. Per pemberi kerja<br>b. Per kecamatan dan kelurahan<br>d. Per sektor usaha | |
| 3. Melakukan Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan melalui:<br>a. LDK<br>b. Kelas Pajak online dan offline<br>c. Instagram Live<br>d. Podcast<br>e. Pemasangan Banner di tempat strategis<br>f. Menyebarluaskan flyer dan brosur di tempat keramaian | |
| Melakukan WA Blast dengan sasaran WP sebagai Berikut : WP yang terdaftar di tahun 2024, WP yang lapor SPT Tahunan bulan Nopember dan Desember 2024, WP yang lapor di tahun 2024, WP yang menjadi WP Wajib lapor SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 | |
| Membuat Himbauan kepada WP Pemberi Kerja untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Form 1721 A1/A2 dan Penyampaian SPT Tahunan untuk Karyawan Pemberi Kerja tersebut. | |

| | | |
|---|---|---|
| **03a-CP** | : | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **25%** | **50%** | **50%** | **75%** | **75%** | **100%** | **100%** |
| **Realisasi** | **13,11%** | **18,52%** | **18,52%** | **31,24%** | **31,24%** | **103,68%** | **103,68%** |
| **Capaian (Max 120)** | **52,44%** | **37,04%** | **37,04%** | **41,65%** | **41,65%** | **103,68%** | **103,68%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

| | |
|---|---|
| **Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM** | **x 100%** |
| **Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM** | |

- **Realisasi IKU**

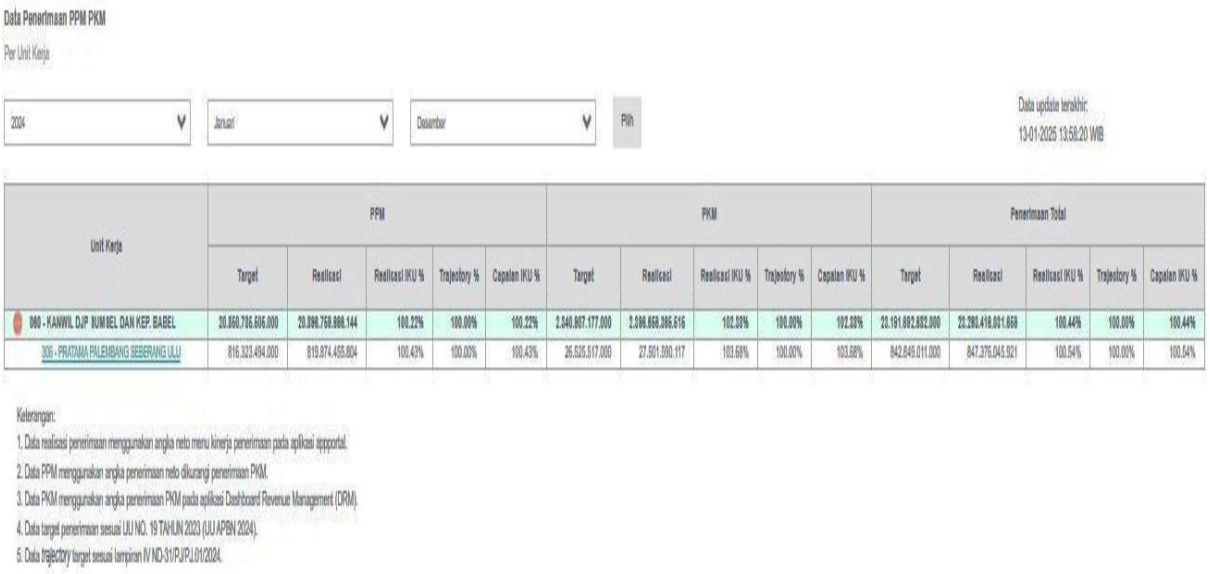

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir:
13-01-2025 13:58:20 WIB

| Unit Kerja | PPM | | | | | PKM | | | | | Penerimaan Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % |
| 060 - KANWIL DJP SUMBEL DAN KEP. BABEL | 20.860.786.606.000 | 20.898.758.888.144 | 100.22% | 100.00% | 100.22% | 2.340.807.177.000 | 2.398.658.286.515 | 102.33% | 100.00% | 102.33% | 23.191.892.832.000 | 23.293.418.031.858 | 100.44% | 100.00% | 100.44% |
| 306 - PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU | 816.323.494.000 | 819.874.455.804 | 100.43% | 100.00% | 100.43% | 26.525.517.000 | 27.501.590.117 | 103.68% | 100.00% | 103.68% | 842.849.011.000 | 847.376.045.921 | 100.54% | 100.00% | 100.54% |

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

| PKM PPM | TARGET | REALISASI | Trajectory | Capaian | Indeks Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| PKM | 26.525.517.000 | 27.501.590.117 | 100% | 103,68% | **103,68%** |

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | | 96,42% | 97,47% | 100,84 | 103,68% |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% | - | 100% | 103,68% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% | 100% | 103,68% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama.
  c. penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Melakukan optimalisasi peran komite kepatuhan dalam rangka peningkatan kualitas DSP4 Kolaboratif melalui Adjusment DSP4 rekomendasi dengan pembahasan yang komperhensif | Tahun 2025 |
| 2. Menyusun daftar prioritas pengawasan (DPP) secara lebih selektif (tidak long list) namun memiliki potensi penerimaan PKM yang besar untuk dijadikan prioritas kegiatan pengawasan kepatuhan material, yang datanya bersumber dari data pemicu, data penguji, dan data internal lainnya | |
| 3. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk mempercepat penyelesaian SP2DK yang telah ditutup dalam pengawasan tetapi belum atau kurang melakukan pembayaran | |
| 4. Menerbitkan SP2DK atas DPP semester 1 tahun 2025 | |
| 5. Mengusulkan pemeriksaan P3 terkait data konkrit | |
| a. Mempercepat penyelesaian pemeriksaan riksus yg memiliki pontesi SKPKB besar | |
| b. Melakukan pembahasan DSPP dan DPP dengan Komite Kepatuhan KPP untuk memperoleh bahan baku pemeriksaan yang berkualitas | |
| c. Melakukan analisa mandiri dari fungsional untuk menambah bahan baku pemeriksaan terutama untuk WP RTLB atau WP yang telah dilakukan pengembalian pendahuluan | |
| a. Melakukan pembahasan DSPC secara berkala bersama Komite Kepatuhan untuk pemutakhiran DSPC | |

| |
|---|
| b. Melakukan himbauan dan konseling kepada Wajib Pajak serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi pokok pajak yang seharusnya dibayar dan mengajukan pengurangan sanksi administrasi dari sisa tunggakan pajak |
| c. Melakukan optimalisasi tindakan penagihan aktif seperti teguran, paksa, dan sita) terutama yang mendekati daluarsa |
| d. Melakukan permintaan pemblokiran ke pihak perbankan atas rekening wajib pajak dan penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak yang potensial |
| e. Mengajukan permintaan bantuan penelusuran aset terhadap Wajib Pajak beserta Penanggung Pajak yang sulit ditemukan |
| 1. Mencari bahan baku melalui sinergi dengan seksi pengawasan |
| 2. Menghubungi wajib pajak secara berkala untuk melakukan pembayaran sesuai dengan bulan komitmen |
| 3. Menggali potensi wajib pajak saat melakukan konsultasi di helpdesk |
| Menindaklanjuti bila ada permintaan koordinasi dari pihak Kanwil DJP Sumsel dan Babel. |

| | | |
|---|---|---|
| **04a-CP** | : | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **10%** | **40%** | **40%** | **60%** | **60%** | **74%** | **74%** |
| **Realisasi** | **12,50%** | **41,47%** | **41,47%** | **87,41%** | **87,41%** | **88,88%** | **88,88%** |
| **Capaian (Max 120)** | **120,00%** | **103,68%** | **103,68%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

  Sub IKU Kegiatan

  Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

  Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

  Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

  Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

  Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

  Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

  DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
    a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
    b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
    a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
    b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
    c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

| | |
|---|---|
| **IKU EP =** | **{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}** |

- **Realisasi IKU**

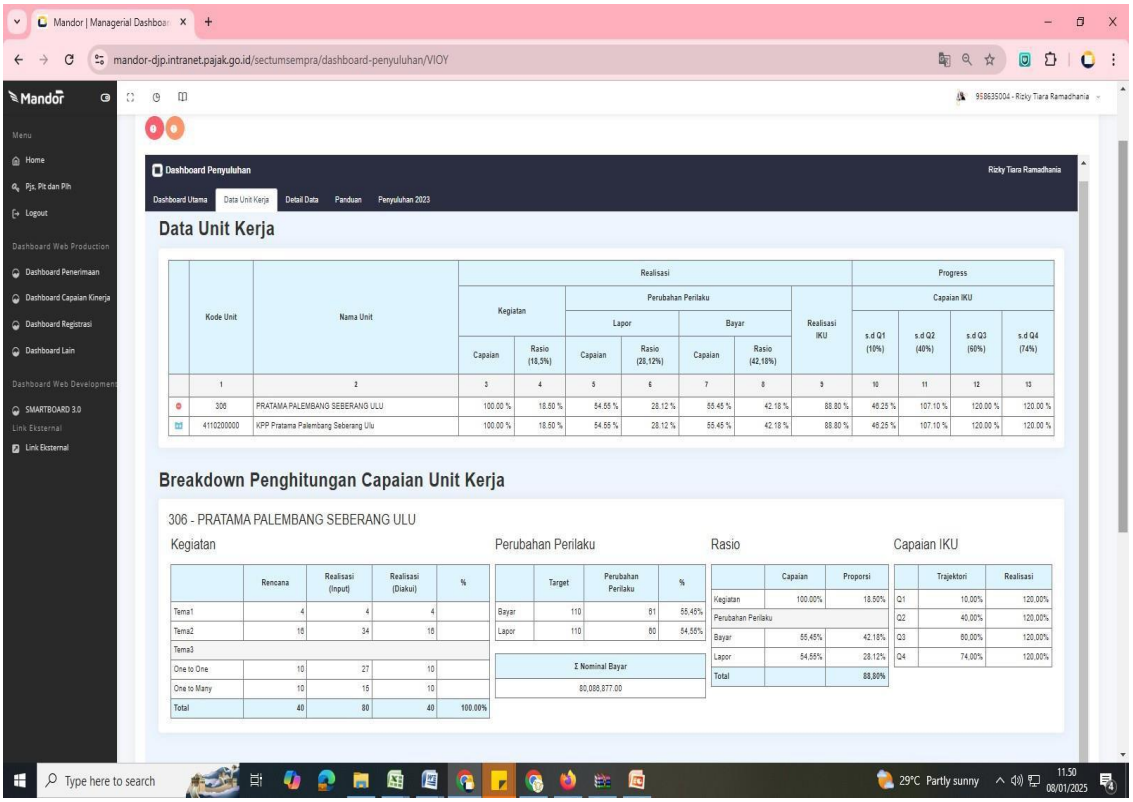


**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU<br><br>Target | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023<br><br>120,00% | Realisasi Tahun 2024<br><br>120,00% |
|---|---|---|---|---|---|

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | 74% | 120% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% | - | 120% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Membuka Kelas Pajak Setiap Hari di Ruang Musi | Tahun 2025 |
| 2. Mengadakan Sosialisasi Aplikasi Coretax melalui media sosial resmi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu | |
| 40 kegiatan tema 1 2 3, RSUD penyuluh bendahara kecamatan, tinggal join dengan AR, Surat menyurat dibuat penyuluh, Praktik nya AR | |

| | | |
|---|---|---|
| **04b-N** | : | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan |

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **5%** | **5%** | **5%** | **15%** | **15%** | **85%** | **100%** |
| **Realisasi** | **6,41%** | **6,41%** | **6,41%** | **18,00%** | **18,00%** | **94,38%** | **112,38%** |
| **Capaian (Max 120)** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **112,38%** | **112,38%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

  Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

  1. Survei kepuasan pelayanan :
     terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
  2. Survei efektivitas penyuluhan :
     terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
  3. Survei efektivitas kehumasan :

terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.
Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.
Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

| **Indeks Hasil Survei** |
|---|

- **Realisasi IKU**

**Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024**

| Kode KPP | KPP | Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024 | | Indeks Capaian Triwulan IV Tahun 2024 | Nilai Realisasi IKU TW IV | Realisasi Y-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan | Indeks Efektivitas Penyuluhan | | | |
| 301 | KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR | 94,33 | 79,25 | 86,79 | 89,96 | 107,96 |
| 302 | KPP PRATAMA BATURAJA | 92,89 | 86,32 | 89,61 | 92,88 | 110,88 |
| 303 | KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU | 88,46 | 81,72 | 85,09 | 88,2 | 106,2 |
| 304 | KPP PRATAMA PANGKAL PINANG | 93,54 | 86,91 | 90,23 | 93,53 | 111,53 |
| 305 | KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN | 92,29 | 85,59 | 88,94 | 92,19 | 110,15 |
| 306 | KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU | 93,52 | 88,58 | 91,05 | 94,38 | 112,38 |
| 307 | KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT | 91,45 | 81,67 | 86,56 | 89,73 | 107,73 |
| 308 | KPP MADYA PALEMBANG | 91,85 | 84,1 | 87,97 | 91,19 | 109,19 |
| 309 | KPP PRATAMA LAHAT | 88,72 | 85,93 | 87,32 | 90,52 | 108,52 |
| 312 | KPP PRATAMA KAYU AGUNG | 95,09 | 87,39 | 91,24 | 94,58 | 112,58 |
| 313 | KPP PRATAMA PRABUMULIH | 91,56 | 92,56 | 92,06 | 95,43 | 113,43 |
| 314 | KPP PRATAMA SEKAYU | 89,71 | 87,67 | 88,69 | 91,93 | 109,93 |
| 315 | KPP PRATAMA BANGKA | 93,00 | 87,15 | 90,07 | 93,37 | 111,37 |

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 120% | 120% | 120% | 102,68% | 112,38% |

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% | - | 100% | 112,38% |

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% | - | 112,38% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Memberikan tutorial cara pengisian survei dan mensosialisasikan melalui media sosial terkait survei yang sedang berlangsung | Tahun 2025 |
| 1. Memberitahukan WP responden terkait survey kepuasan layanan yang akan dilakukan | |
| 2. Memberikan pemahanam kepada wajib pajak akan pentingnya survei dari tim penilai independen | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan kepada WP dengan cara :<br>a. layanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan<br>b. Memperbaiki sarana prasarana TPT dan Helpdesk<br>c. Memperbaiki sarana prasarana di kelas pajak | |

| | | |
|---|---|---|
| **05a-CP** | : | Persentase pengawasan pembayaran masa |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **90%** | **90%** | **90%** | **90%** | **90%** | **90%** | **90%** |
| **Realisasi** | **120,00%** | **116,70%** | **116,00%** | **111,15%** | **111,15%** | **115,80%** | **115,80%** |
| **Capaian (Max 120)** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120%** | **120%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

  Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

  a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

     Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

     1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

        a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

        Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan

pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
   - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
   - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
   - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
   a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

**40% untuk Kuantitas Penelitian;**
**60% untuk Kualitas Penelitian;**
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan

dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

**60% untuk Kuantitas Penelitian;**
**40% untuk Kualitas Penelitian;**

4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
   - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
   - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
   - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

   Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

   Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:
Penjelasan terkait ketentuan lanjutan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
    a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
    b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
        - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
        - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
        - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
        - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
    c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
        - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
        - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
        - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
        - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
   - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
   - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e) Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
   a) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
   b) Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- **Realisasi IKU**

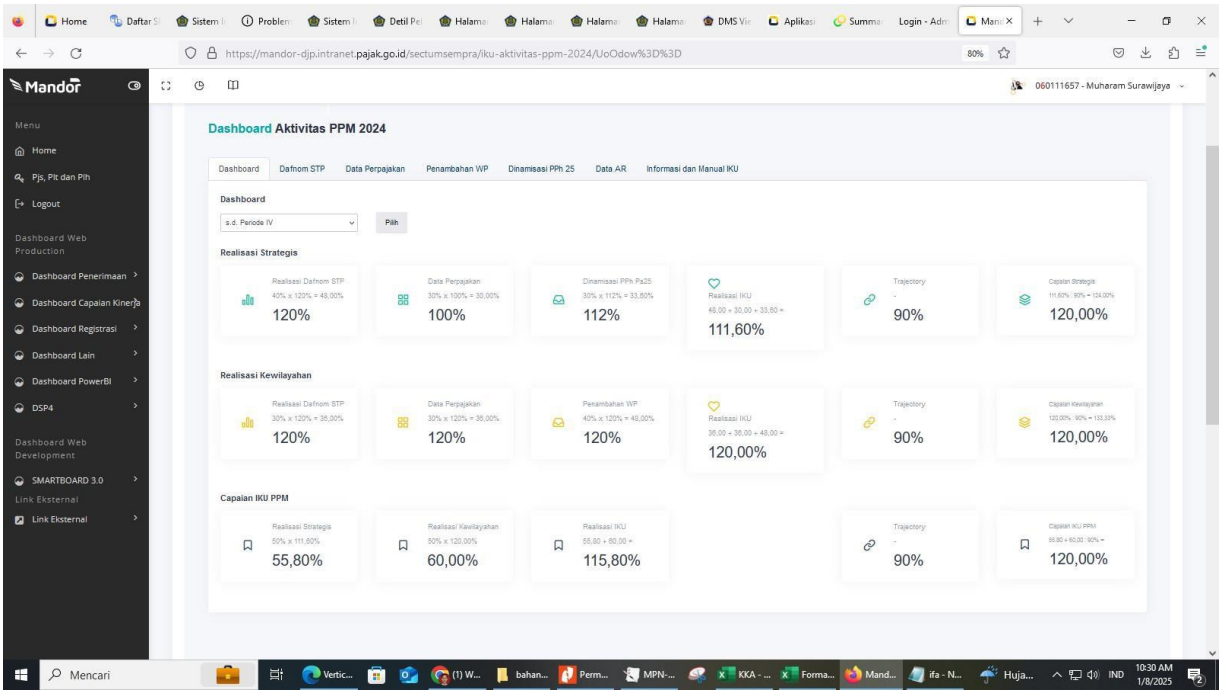


**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | | 120% | 115,94% | 120% | 120% |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | - | 90% | 120% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | - | 120% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi penerimaan pajak dari kegiatan Persentase pengawasan pembayaran masa). menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan pajak dari kegiatan penerimaan pajak dari kegiatan Persentase pengawasan pembayaran masa secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama
  c. penerimaan pajak dari kegiatan Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Persentase pengawasan pembayaran masa. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Melakukan penerbitan STP berdasarkan data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak dan selalu memantau aplikasi approweb.<br>2. Melakukan penerbitan STP diluar daftar nominatif dengan nilai nominal sanksi minimal sebesar Rp100.000,-. | Tahun 2025 |
| 1. Menindaklanjuti seluruh data pemicu dan data penguji tahun berjalan menjadi LHPt dan/atau SP2DK segera setelah data diturunkan pada Aplikasi APPROWEB | |
| 1. Menindaklanjuti seluruh Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya, untuk dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt); | |
| 2. Melakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 (dinamisasi) untuk WP Strategis diharapkan berpedoman dengan ND-723/PJ.06/2024 tanggal 21 Juni 2024. | |
| 1. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi yang diturunkan pada aplikasi SIDJP Nine Modul Ekstensifikasi dengan cara : | |
| a. melakukan analisa terhadap data yang berpotensi untuk diterbitkan NPWP melalui cek validitas Data NIK dan Nomor Kartu Keluarga serta data lainnya pada Aplikasi Dukcapil Online | |
| b. Melakukan visit ke WP terkait SP2DKE yang diterbitkan | |
| c. Menggunakan data pegawai pada SPT PPh 21 Pemberi Kerja wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang masih menggunakan NPWP 000 | |
| d. Melakukan Kegiatan KPDL dan menganalisis data ILAP untuk menambah bahan baku DSE | |

| | | |
|---|---|---|
| **06a-CP** | : | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Realisasi** | 110,14% | 118,64% | 118,64% | 113,65% | 113,65% | 120,00% | 120,00% |
| **Capaian (Max 120)** | 110,14% | 118,64% | 118,64% | 113,65% | 113,65% | 120,00% | 120,00% |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

  1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%).

     Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

     Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

     Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

     A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)
Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE- 05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:
1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:
1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).
   Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

   Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

   A. Komponen Kuantitas (40%)
      Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

      Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

      1) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan: a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2; b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1) DPP tahun berjalan; dan
2) SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
   a) dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
   b) usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
      1. pemeriksaan khusus data konkret;
      2. pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
   c) usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh

Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.
Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

| | | |
|---|---|---|
| **Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan** | **=** | **(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)**<br><br>**+**<br><br>**(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))** |

- **Realisasi IKU**

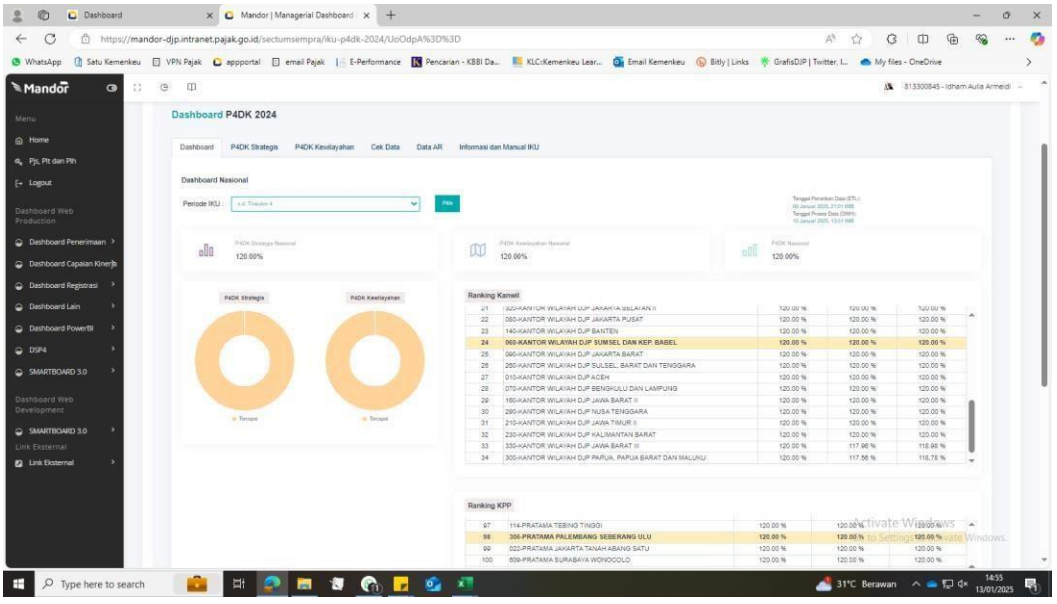

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 82,36% | 114,28% | 120% | 120% | 120% |

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | - | 100% | 120% |

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | - | 100% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan pajak dari kegiatan penerimaan pajak dari kegiatan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama
  c. penerimaan pajak dari kegiatan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| menyiapkan data dan bahan yang berkualitas sebelum dilakukannya rapat komite kepatuhan | Tahun 2025 |
| Memilih DPP yang berkualitas, bersumber dari data yang valid, dengan nilai potensi pajak yang signifikan, | |
| melakukan pencarian data dan analisa potensi pajak secara mandiri | |
| Penyusunan strategi penggalian potensi perpajakan dengan mengoptimalkan pada Wajib Pajak yang diproyeksikan tumbuh pada tahun berjalan | |
| WP yang akan dijadikan DPP diketahui keberadaanya dan memiliki ATP yang tinggi | |
| Mempercepat Penerbitan SP2DK atas DPP koolaboratif, analisis mandiri, ataupun DPP mandatori yang telah diajukan dan ditetapkan | |
| Melakukan penelitian, perincian, dan penggalian mendalam atas potensi SP2DK yang telah diterbitkan | |
| Peningkatan Kompetensi dalam bentuk FGD/sharing session/IHT untuk AR dengan memfokuskan pada peningkatan kompetensi pemanfaatan data Approweb/ Mandor | |
| Meningkatkan Skill dan Kompetensi Kepala Seksi Pengawasan dan Account Representative melalui IHT/Bimtek atau FGD tema tertentu | |
| Pairing AR yang memiliki kompetensi kurang dengan AR yang memiliki kompetensi tinggi | |
| Kolaborasi AR dengan Fungsional Penyuluh dan Fungsional Pemeriksa Pajak /Penilai untuk mendorong Wajib Pajak membayar komitmennya | |
| Melakukan Komunikasi persuasif yang efektif saat kegiatan konseling | |
| Melakukan permintaan penjelasan data dan keterangan kepada Wajib Pajak, menghubungi dan melakukan visit secara langsung terhadap Wajib Pajak yang telah dikirimkan SP2DK | |
| Menerbitkan Undangan Konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK dan atau | |

| |
|---|
| belum membayar Potensi pajak sebagaimana SP2DK |
| Bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam menemukan keberadaan Wajib Pajak (RT/RW/ Kelurahan) |
| Mempercepat penerbitan LHP2DK atas SP2DK yang telah diterbitkan. |
| Monitoring secara berkala terkait penyelesaian SP2DK. Apabila terdapat SP2DK yang akan segera jatuh tempo bisa segera ditindaklanjuti. |

| | | |
|---|---|---|
| **06b-N** | : | Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Realisasi** | **108,36%** | **116,06%** | **116,06%** | **117.62%** | **117.62%** | **120,00%** | **119.44%** |
| **Capaian (Max 120)** | **108,36%** | **116,06%** | **116,06%** | **117.62%** | **117.62%** | **120,00%** | **119.44%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
  1. Pemanfaatan Data STP
     Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
     a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalahtindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- **Realisasi IKU**

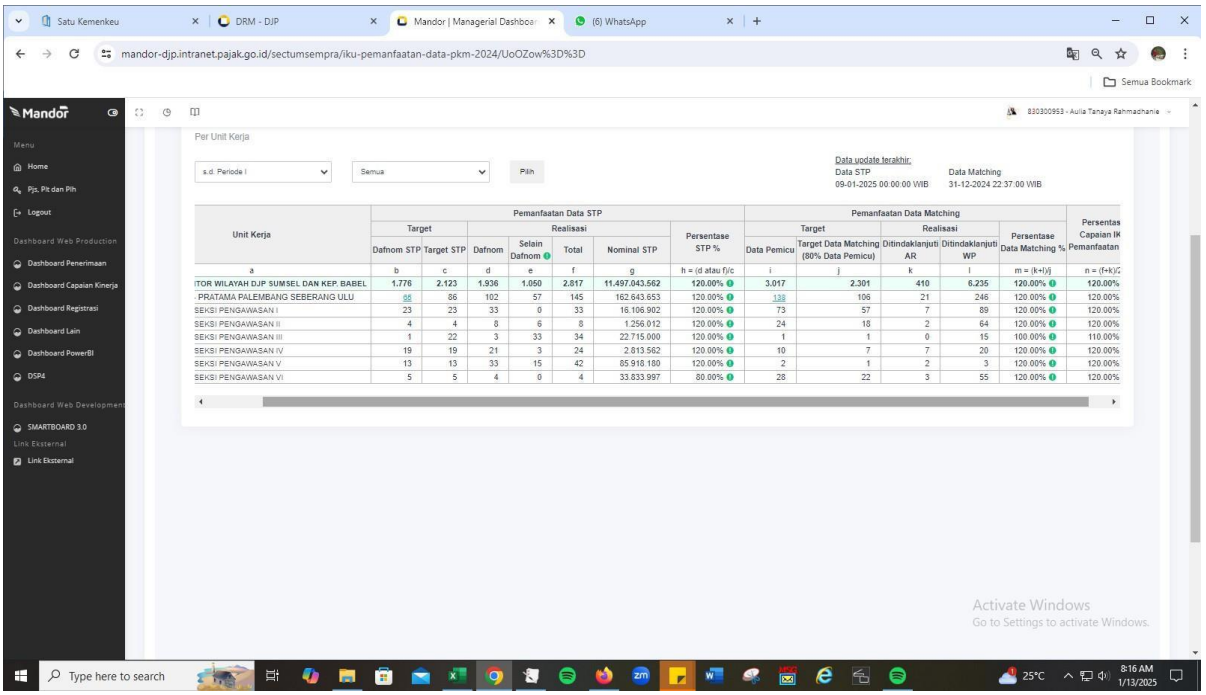


2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU<br><br>Target | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023<br><br>120,00% | Realisasi Tahun 2024<br><br>119.44% |
|---|---|---|---|---|---|

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | - | - | 100% | 119.44% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | 100% | - | 119.44% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan menyampaikan hasil pemantauan kinerja secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Menyampaikan Informasi kepada KPP tempat Pemungut terdaftar bahwa terdapat Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh WP Pemungut namun belum dilaporkan oleh WP Penerbit.<br>2. Melanjutkan penelitian atas data pemicu selain tahun pajak berjalan yang tersedia dan menindaklanjutinya dengan memasukkannya dalam PKM WRA dan DPP Mandatori | Tahun 2025 |
| 3. Melakukan penelitian atas data pemicu selain tahun berjalan.yang berpotensi untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya<br>4. Mengirimkan hasil penelitian terhadap data yang validitasnya rendah ke Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel untuk tidak dimunculkan lagi dalam bahan baku PKM dan pemanfaatan Data | |

| | | |
|---|---|---|
| **06c-N** | : | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Realisasi** | 120,00% | 117,34% | 117,34% | 94,62% | 94,62% | 118,31% | 118,31% |
| **Capaian (Max 120)** | 120,00 | 117,34 | 117,34 | 94,62 | 94,62 | 118,31 | 118,31 |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

| | |
|---|---|
| **IKU =** | **30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan** |

- **Realisasi IKU**

**10. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

**Formula**

**30% LPT KKWP KPP Tepat Waktu/Laporan KKWP Kanwil DJP Tepat Waktu+ 40% Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan + 30% Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan**

Catatan:

1. Alat untuk mengukur komponen "Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan" adalah *Dashboard* Rapor Kinerja unit kerja pada Mandor.
2. Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka IKU/IKI Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari:

70% LPT KKWP KPP Tepat Waktu/Laporan KKWP Kanwil DJP Tepat Waktu + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

| | |
|---|---|
| Capaian Penyampaian Laporan Komite Kepatuhan KPP | 120,00% |
| Capaian Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan | 115,77% |
| Capaian Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan | 120,00% |
| **Capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP** | 118,31% |

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| **Nama IKU** | **Realisasi Tahun 2020** | **Realisasi Tahun 2021** | **Realisasi Tahun 2022** | **Realisasi Tahun 2023** | **Realisasi Tahun 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | | | | | 118,31% |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | 100% | 118,31% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% | - | 118,31% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

**Supaya IKU dapat tercapai, hal-hal sebagai berikut:**

- Melakukan Rapat Pembentukan Tim Komite Kepatuhan
- Melakukan Pembahasan Penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat Waktu
- Menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat Waktu;
- Membuat Nota Dinas permintaan usulan bahan baku pemeriksaan kepada Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengadministrasikan usulan pemeriksaan;
- Mengadakan rapat pembahasan untuk menetapkan DSPP yang akan diusulkan baik melalui mekanisme RBP maupun Kolaboratif.
- Menyampaian Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat Waktu;
- Mengadakan rapat pembahasan untuk menetapkan DSPP yang akan diusulkan baik melalui mekanisme RBP maupun Kolaboratif.
- Melakukan pengusulan DSPP Kolaboratif Semester II dan DSPP RBP Tahap I Akselerasi
- Melakukan pembahasan DSPP RBP Tahap II
- Melakukan koordinasi antara FPP, AR dan Penilai untuk melakukan penggalian potensi dalam rangka pemenuhan bahan baku pemeriksaan.

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Menyusun Rencana Kerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk Triwulan I Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 2. Melakukan pengelompokan tugas anggota komite kepatuhan berdasarkan fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan, Pelayanan | |
| 3. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan Laporan Komite Kepatuhan, | |
| 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada Dashboard Rapor Kinerja | |
| 5. Membuat Nota Dinas permintaan usulan bahan baku pemeriksaan kepada Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak;<br>6. Mengadministrasikan usulan pemeriksaan;<br>7. Mengadakan rapat pembahasan untuk menetapkan DSPP yang akan diusulkan baik melalui mekanisme RBP maupun Kolaboratif. | |
| 8. Melakukan Pengiriman Nota Dinas atas Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu | |
| 1. Melakukan pembahasan DSPP RBP Tahap II dan DSPP Kolaboratif Semester II<br>2. Melakukan koordinasi antara FPP, AR dan Penilai untuk melakukan penggalian potensi dalam rangka pemenuhan bahan baku pemeriksaan | |
| Pengawasan :<br>1. Menindaklanjuti LHA yang diturunkan Kanwil, SP2DK Outstanding, dan DPP Semester 2 Tahun 2024 dengan skala prioritas succes rate pencairan tinggi<br>2. Melakukan pengawasan, penelitian dan tindak lanjut data perpajakan selain tahun berjalan untuk meningkatkan penerimaan PKM WRA<br>3. Mengolah dan melakukan analisis atas Data dan Informasi Tax Gap dari internal (Monitoring Ketersediaan Data pada Apportal dan Approweb) berdasarkan Nota dinas terkait bahan baku analisis mandiri, selain itu melakukan analisis dari data eksternal (Data | |

| | |
|---|---|
| ILAP)<br>4. Mengusulkan DPP Mandatory<br>5. Melakukan penerbitan STP sesuai dafnom dan di luar dafnom untuk periode sebelum tahun berjalan<br>6. Melakukan pemeriksaan data konkret | |
| DSPE Pengawasan:<br>1. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi yang diturunkan pada aplikasi SIDJP Nine Modul Ekstensifikasi dengan cara ::<br>a. melakukan analisa terhadap data yang berpotensi untuk diterbitkan NPWP melalui cek validitas Data NIK dan Nomor Kartu Keluarga serta data lainnya pada Aplikasi Dukcapil Online : :<br>b. Melakukan visit ke WP terkait SP2DKE yang diterbitkan<br>c. Menggunakan data pegawai pada SPT PPh 21 Pemberi Kerja wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang masih menggunakan NPWP 000 :<br>d. Melakukan Kegiatan KPDL dan menganalisis data ILAP untuk menambah bahan baku DSE | |
| Penagihan :<br>1. Melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak DSPC dengan memberikan solusi untuk mengangsur tunggakan pajak dan mengajukan pengurangan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melunasi pokok pajaknya<br>2. Melakukan tindakan penagihan soft collection, himbauan, dan konseling agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya<br>3. melakukan tebar jaring ke Bank untuk meminta informasi saldo wajib pajak<br>4. melakukan sita rekening berupa pemblokiran nomor rekening wajib pajak dan melakukan pemindahbukuan saldo rekening<br>5.Menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita dengan prioritas Wajib Pajak dengan kohir yang akan daluarsa, serta SKPKB yang baru terbit ditahun berjalan (apabila sudah inkrah) | |
| Pemeriksaan :<br>a. Melakukan pembahasan DSPP dan DPP Triwulan IV dan dengan Komite Kepatuhan | |

| | |
|---|---|
| KPP untuk memperoleh bahan baku pemeriksaan yang berkualitas<br>b. Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan khusus dan Rutin LB terkait dengan dateline keharusan menyelesaiakn pemeriksaan terkait CTAS dan untuk untuk mendukung realisasi PKM pemeriksaan dan realisasi nilai konversi. | |

| | | |
|---|---|---|
| **07a-CP** | : | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Realisasi** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **114,12%** | **114,12%** | **120,00%** | **120,00%** |
| **Capaian (Max 120)** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **114,12%** | **114,12%** | **120,00%** | **120,00%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**
  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

- **Formula IKU**

| | |
|---|---|
| **IKU =** | **(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)** |

- **Realisasi IKU**

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

| | NAMA VARIABEL | BOBOT | TARGET | REALISASI | CAPAIAN* | CAPAIAN X BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP | 15% | 75% | 100,43% | 120,00% | 18,00% |
| 2 | Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan | 25% | 100% | 113,44% | 113,44% | 28,36% |
| 3 | Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan | 30% | 100% | 302,69% | 120,00% | 36,00% |
| 4 | Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu | 25% | 75% | 104,65% | 120,00% | 30,00% |
| 5 | Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi | 5% | 70% | 95,95% | 120,00% | 6,00% |
| | **Realisasi IKU** | | | | | **118,36%** |

*Max 120%

| | |
|---|---|
| **Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)** | **120,00%** |

*Max 120%

*sumber: Aplikasi PortalP2, SIDJP per 31 Desember 2024*

| | | |
|---|---|---|
| 31-Des | **07a-CP** | **120,00%** |

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU<br><br>Target | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024<br><br>120% |
|---|---|---|---|---|---|

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | - | - | 100% | 120,00% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100% | - | 120,00% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi;;
b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan;
c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan;
d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah :

- Komite Kepatuhan melakukan penelitian komprehensif atas Potensi dari Pemeriksaan yang diusulkan oleh *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa

- Melakukan pembahasan atas Hasil Pemeriksaan yang akan ditetapkan
- Melakukan penyelesaian pemeriksaan lebih cepat dari Jatuh Tempo, begitupun juga IKU Penilaian.

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| a. Melakukan pembahasan DSPP dan DPP Triwulanan serta DSP4 Kolaboratif dengan Komite Kepatuhan KPP untuk memperoleh bahan baku pemeriksaan yang berkualitas | Tahun 2025 |
| b. Realisasi Konversi s.d. Triwulan IV sebesar 77,95 (101 LHP) atau sebesar 119,92% dari target dalam 1 tahun sebesar 65, terdapat tunggakan konversi sebesar 36,2 (37 SP2) sehingga untuk mencapai target masih memerlukan konversi sebesar 28,8 | |
| c. Melakukan koordinasi antara FPP, AR dan Penilai untuk melakukan penggalian potensi. | |
| d. Melakukan analisa mandiri dari fungsional untuk menambah bahan baku pemeriksaan terutama untuk WP RTLB atau WP yang telah dilakukan pengembalian pendahuluan. | |
| e. Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan khusus untuk tahun pajak 2020 yang mendekati daluarsa penetapan | |
| a. Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan khusus dan Rutin LB untuk mendukung realisasi PKM pemeriksaan dan realisasi nilai konversi. | |
| Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan sanksi atau melakukan pembayaran SKP secara bertahap untuk Wajib Pajak yang setuju atas hasil pemeriksaan. | |
| Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Alket ke seksi pengawasan atau PKD untuk Wajib Pajak yang terdapat perubahan alamat atau nomor telepon. | |
| Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan dan berkoordinasi dengan AR | |

| | |
|---|---|
| a. Melakukan penelitan AHU dalam sistem apportal untuk menggali potensi peralihan saham | |
| b. Melakukan penelitian atas data PHTB atas peralihan Tanah dan/atau Bangunan | |
| c. Melakukan penelitian atas data PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk penggalian potensi PPN KMS | |
| d. Melakukan koordinasi antara FPP, AR untuk melakukan penggalian potensi. | |

| | | |
|---|---|---|
| **07b-CP** | : | Tingkat efektivitas penagihan |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **15,00%** | **30%** | **30%** | **45%** | **45%** | **75%** | **75%** |
| **Realisasi** | **15,18%** | **37,42%** | **37,42%** | **69,79%** | **69,79%** | **102,09%** | **102,09%** |
| **Capaian (Max 120)** | **101,20%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**
  Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: 1. Variabel tindakan penagihan (50%);3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

| | | |
|---|---|---|
| **IKU** | **=** | **(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)** |

- **Realisasi IKU**

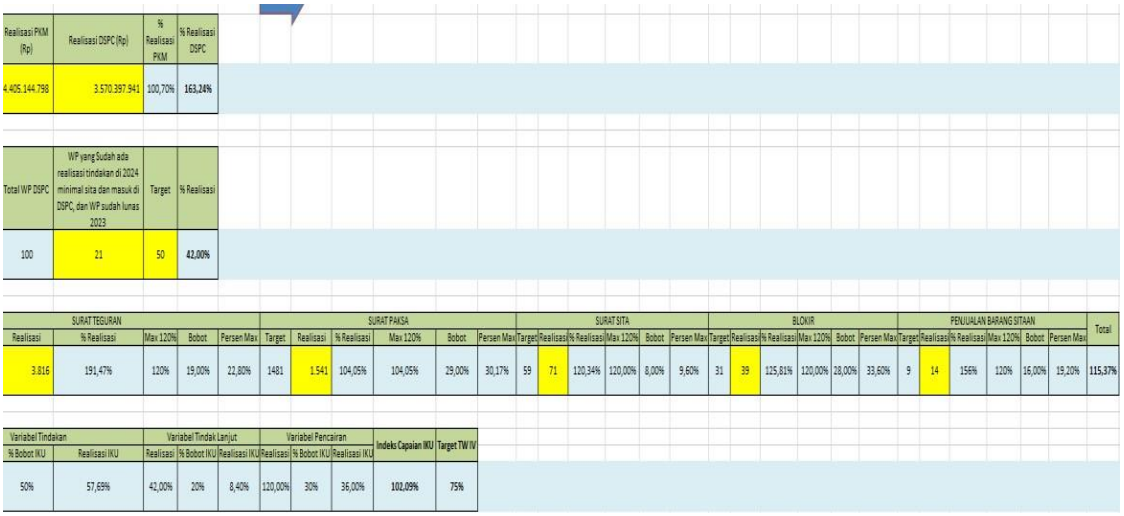

| Realisasi PKM (Rp) | Realisasi DSPC (Rp) | % Realisasi PKM | % Realisasi DSPC |
|---|---|---|---|
| 4.405.144.798 | 3.570.397.941 | 100,70% | 163,24% |

| Total WP DSPC | WP yang Sudah ada realisasi tindakan di 2024 minimal sita dan masuk di DSPC, dan WP sudah lunas 2023 | Target | % Realisasi |
|---|---|---|---|
| 100 | 21 | 50 | 42,00% |

| SURAT TEGURAN | | | | | SURAT PAKSA | | | | | | SURAT SITA | | | | | | BLOKIR | | | | | | PENJUALAN BARANG SITAAN | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisasi | % Realisasi | Max 120% | Bobot | Persen Max | Target | Realisasi | % Realisasi | Max 120% | Bobot | Persen Max | Target | Realisasi | % Realisasi | Max 120% | Bobot | Persen Max | Target | Realisasi | % Realisasi | Max 120% | Bobot | Persen Max | Target | Realisasi | % Realisasi | Max 120% | Bobot | Persen Max | |
| 3.816 | 191,47% | 120% | 19,00% | 22,80% | 1481 | 1.541 | 104,05% | 104,05% | 29,00% | 30,17% | 59 | 71 | 120,34% | 120,00% | 8,00% | 9,60% | 31 | 39 | 125,81% | 120,00% | 28,00% | 33,60% | 9 | 14 | 156% | 120% | 16,00% | 19,20% | 115,37% |

| Variabel Tindakan | | Variabel Tindak Lanjut | | | Variabel Pencairan | | | Indeks Capaian IKU | Target TW IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Bobot IKU | Realisasi IKU | Realisasi | % Bobot IKU | Realisasi IKU | Realisasi | % Bobot IKU | Realisasi IKU | | |
| 50% | 57,69% | 42,00% | 20% | 8,40% | 120,00% | 30% | 36,00% | 102,09% | 75% |

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | | 120% | 120% | 120% | 120% |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat efektivitas penagihan | - | - | 75% | 120% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Tingkat efektivitas penagihan | 75% | - | 120% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

Tingkat Efektivitas Penagihan diukur melalui 5 (lima) variabel, yaitu:

a. penerbitan Surat Teguran;
b. pemberitahuan Surat Paksa;
c. pemblokiran;
d. penyitaan;
e. penjualan barang sitaan;

IKU Efektivitas Penagihan Tahun 2024 tercapai dengan persentase capaian 120%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai realisasi 120% adalah sebagai berikut;

1) Melakukan penelitian secara rutin terhadap Wajib Pajak yang dapat ditegur untuk kemudian ditindaklanjuti sampai dengan pengiriman Surat Teguran kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
2) Mengoptimalisasikan Pemberitahuan Surat Paksa dengan memprioritaskan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang masih aktif lapor SPT, aktif kegiatan usahanya, ada pembayaran pajaknya serta SKP/STP dari hasil pemeriksaan terlebih dahulu;
3) Melakukan optimalisasi terhadap kegiatan pemblokiran;
4) Melakukan optimalisasi terhadap kegiatan penyitaan;
5) Menjual barang sitaan yang dilakukan tepat waktu;
6) Melakukan optimalisasi terhadap kegiatan pencegahan.

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| a. Melakukan himbauan dan konseling kepada Wajib Pajak serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi pokok pajak yang seharusnya dibayar dan mengajukan pengurangan sanksi administrasi dari sisa tunggakan pajak | Tahun 2025 |
| b. Melakukan optimalisasi tindakan penagihan aktif seperti teguran, paksa, dan sita) terutama yang mendekati daluarsa | |
| c. Melakukan Penjualan Barang Sitaan | |
| d. Melakukan permintaan pemblokiran ke pihak perbankan atas rekening wajib pajak dan penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak yang potensial | |
| e.Mengajukan permintaan bantuan penelusuran aset terhadap Wajib Pajak beserta Penanggung Pajak yang sulit ditemukan | |

| | | |
|---|---|---|
| **07c-N** | : | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **25%** | **50%** | **50%** | **75%** | **75%** | **100%** | **100%** |
| **Realisasi** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Capaian (Max 120)** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**
  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IKU** | **=** | Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah/ Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah | x100% |

- **Realisasi IKU**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JALAN TASIK, KAMBANG IWAK, PALEMBANG 30135
TELEPON (0711) 357077, 315359, 312295, FAKSIMILE (0711) 313119, 351512, LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-2344/WPJ.03/2024

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran : Satu Set
Hal : Jawaban atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan PT Arshaka Putra Utama
Tanggal : 19 Agustus 2024

Sehubungan dengan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu atas Wajib Pajak :

| No. | Nama & NPWP | Dasar Usulan Pemeriksaan Buper | Hasil Penelaahan |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Arshaka Putra Utama<br>NPWP : 66.353.493.3-306.000 | ND-842/KPP.0303/2024<br>Tanggal 03 Juli 2024 | Diterima |

dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil penelaahan untuk Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Saudara sampaikan atas 1 (Satu) Wajib Pajak **diterima**, dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penelaahan nomor BA-20/USULBP/WPJ.034/2024, tanggal 13 Agustus 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Tarmizi

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU<br><br>Target | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024<br><br>100,00% |
|---|---|---|---|---|---|

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | 100% | 100% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% | - | 100% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| Menambah kuantitas jumlah usulan pemeriksaan bukti permulaan dan mengajukan usulan pemeriksaan bukti permulaan di awal tahun | Tahun 2025 |
| Perlu dilakukan kolaborasi antara AR, FPP, dan Kanwil DJP | |
| Melakukan sinergi antara AR, FPP, dan Penilai dalam rangka percepatan penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | |

| | | |
|---|---|---|
| **08a-CP** | : | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| **Realisasi** | 39,38% | 113,25% | 113,25% | 115,00% | 115,00% | 120,00% | 120,00% |
| **Capaian (Max 120)** | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**
  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- **Formula IKU**

| Formula |
|---|
| **1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan** |
| |
| **Realisasi Maksimal 120%** |

| 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan |
|---|
| |
| **Realisasi Maksimal 120%** |

- **Realisasi IKU**

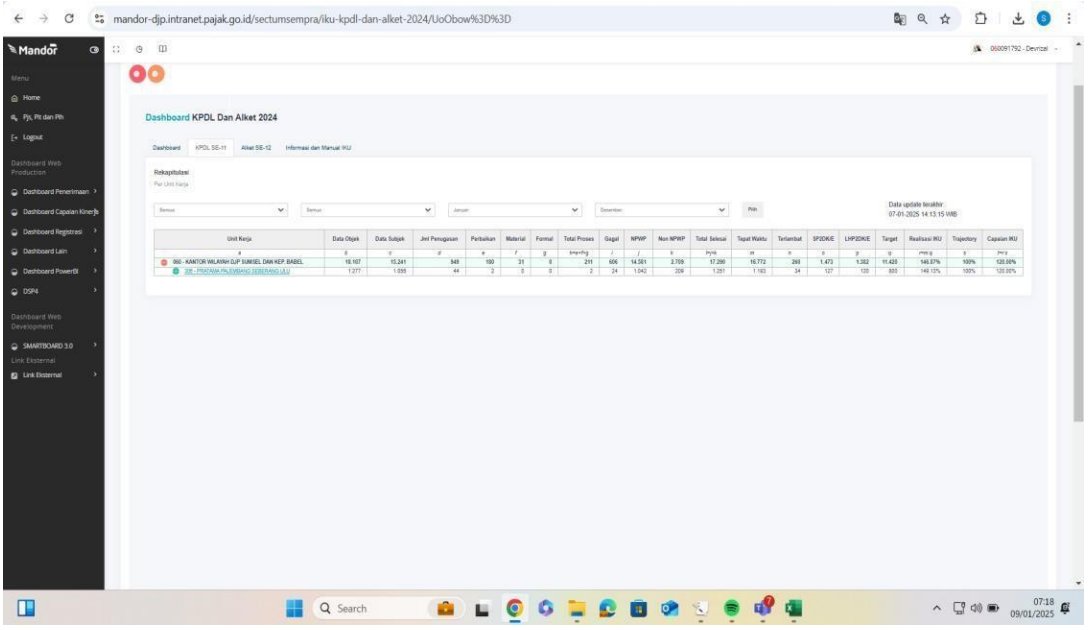


2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | | | | 102,27% | 120% |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | - | - | 100% | 120% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% | - | 120% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

Data potensi pajak adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui alat keterangan (alket) serta Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi pajak dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Data potensi pajak yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

a. Terdapat identitas Wajib Pajak berupa NPWP dan/atau NIK;
b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan kamus data dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan
c. Data koordinat lokasi Wajib Pajak yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020;

Realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 120%.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan realisasi IKU ini sebesar 120% adalah sebagai berikut:

a. Monitoring dan meneliti data KPDL di Aplikasi SIDJPNINE;
b. Memverifikasi dan *approval* alket yang telah diinput Account Representative secara tepat waktu dengan ketentuan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung dan validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD;
c. Data KPDL didapat dengan pengumpulan data dan informasi bersamaan dengan kunjungan kerja AR ke lokasi Wajib Pajak di wilayah kerja masing-masing AR serta memanfaatkan data internet dan sosial media.

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Menyiapkan data terkait sentra ekonomi, yang menjadi dasar untuk kegiatan KPDL | Tahun 2025 |
| 2.Membuat perencanaan yang matang terkait jangka waktu pada surat tugas agar hasil KPDL dapat diinput dalam aplikasi secara tepat waktu | |
| 3. Melakukan kegiatan KPDL sesuai dengan pemetaan dan prioritas | |
| 4. Melakukan koordinasi dengan PKD terkait validasi kebenaran formal segera setelah dilakukan validasi oleh Kasi Pengawasan | |
| 5. Memanfaatkan data internal dan data pihak ketiga | |
| 6. Melakukan Rapat Pembahasan WP yang akan dilakukan Pengamatan | |

| | | |
|---|---|---|
| **08b-CP** | : | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55% |
| **Realisasi** | 77,60% | 77,60% | 77,60% | 83,20% | 83,20% | 83,20% | 83,20% |
| **Capaian (Max 120)** | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**
  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

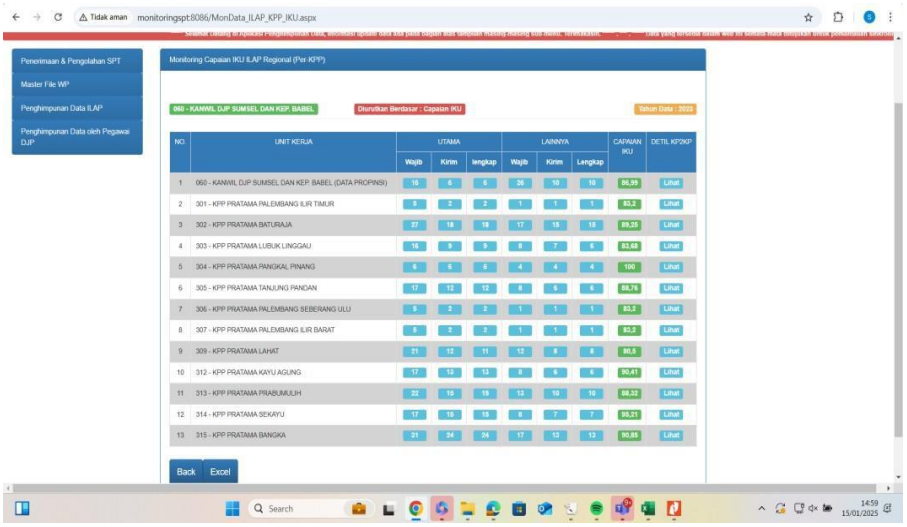


2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| **Nama IKU**<br><br>**Target** | **Realisasi Tahun 2020** | **Realisasi Tahun 2021** | **Realisasi Tahun 2022** | **Realisasi Tahun 2023**<br><br>120% | **Realisasi Tahun 2024**<br><br>120% |
|---|---|---|---|---|---|

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | 55% | 120% |

1. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% | - | 120% |

2. **Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

   IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU baru di tahun 2023, dalam merealisasikannya KPP Pratama menjalankan beberapa rencana aksi antara lain: Koordinasi yang telah dilakukan akan dilaksanakan lagi dengan lebih intensif dan Monitoring kepada PIC pengiriman data dari Kanwil ke DIP secara intensif. KPP Pratama Palembang Palembang Seberang Ulu juga memiliki beberapa tantangan.

   Persentase penghimpunan data regional dari ILAP antara lain : Koordinasi yang dilakukan sangat bergantung pada kesiapan pihak ILAP sebagai penyedia data serta Pengiriman data ke DIP sangat bergantung pada pihak kanwil sebagaimana prosedur pengiriman data yang telah ditetapkan.

3. **Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| Melakukan *follow-up* kepada Pemerintah Kota terkait surat permintaan yang sudah dikirimkan oleh Kanwil untuk segera ditindaklanjuti. | Tahun 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **09a-N** | : | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Realisasi** | **118,00%** | **125,51%** | **125,51%** | **120,00%** | **120,00%** | **111,72%** | **117,47%** |
| **Capaian (Max 120)** | **118,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **111,72%** | **117,47%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**
  **Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:**
  1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya
  2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
  3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

- **Formula IKU**

| | |
|---|---|
| **Formula Komponen Kualitas Kompetensi** | (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%) |

- **Realisasi IKU**

15. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

| | |
|---|---|
| Komponen Tingkat Kualitas Kompetensi | 103,45% |
| Komponen Pelaksanaan Kebintan SDM | 120,00% |
| Capaian dan Realiasi IKU | 111,72% |

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | | | | | 117,47% |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | - | - | 100% | 117,47% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100% | - | 117,47% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing- masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.

Terdapat upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target, seperti:

a. Meminta masukan pada seksi seksi terkait tentang jenis diklat yang dibutuhkan sejak awal tahun; dan
b. Mengantisipasi jenis diklat yang dibutuhkan berdasarkan jenis diklat yang harus dilakukan pada tahun sebelumnya.

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Mengompilasi laporan dan bukti pendukung kegiatan kebintalan. | Tahun 2025 |
| 2. Mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan kebintalan ke Kanwil melalui Nadine. | |
| Memastikan keikutsertaan Kepala Kantor dalam setiap kegiatan kebintalan yang akan dilaporkan | |
| Memastikan kegiatan kebintalan di masing-masing bidang kegiatan dapat terlaksana, minimal satu kegiatan di tiap bidangnya. | |
| 1. Menugaskan pegawai untuk mengikuti elearning | |
| 2. Melakukan input nota dinas/surat tugas kegiatan IHT/Bimtek/Sosialisasi | |
| 3. Melakukan input pengakuan jamlat tatap muka pegawai pada aplikasi SIKKA | |
| 4. Melakukan Monitoring capaian Jamlat Pegawai Pada Aplikasi Sikka | |
| 5. Menyampaiakan kepada para pegawai apabila terdapat e-learning pada KLC yg dapat diakses pada seluruh pegawai | |

| | |
|---|---|
| 1. Menyampaikan usulan pengembangan kompetensi di setiap jenjang jabatan pejabat fungsional, AR, dan pelaksana umum untuk tahun 2025 | |
| 2. Mengadakan IHT rutin untuk seluruh pegawai guna meningkatkan kompetensinya | |
| 3. Melaksanakan Uji Kompetensi Teknis bagi pelaksana umum dalam rangka kenaikan jabatan | |

| | | |
|---|---|---|
| **09b-N** | : | Indeks Penilaian Integritas Unit |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **-** | **-** | **-** | **85%** | **-** | **85%** | **85%** |
| **Realisasi** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **100,00%** | **100,00%** | 94,97% | 94,97% |
| **Capaian (Max 120)** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **100,00%** | **100,00%** | **111,73%** | **111,73%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**
  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

  1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

  **Q3 = Penyampaian Longlist Responden.**

  Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

  - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
  - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
  - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

  **Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.**

- **Realisasi IKU**

1. Rapat Monev Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM Triwulan III Tahun 2024

2. Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Survei

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

Nomor : S-800/KPP.0303/2024 — 23 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan Metode Survei

Yth. CHANDRA WIJAYA - NG KIAN TJUN
Jl Jembatan Musi II RT 026 RW 006
Keramasan, Kertapati, Kota Palembang
Sumatera Selatan

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan pengujian ditempat wajib pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan, kami sampaikan kepada Saudara bahwa Unit Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, yang terdiri dari:

1. Nama / NIP : Arnova Dellia Mitasari K. / 19761119 199903 2 001
   Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Nama /NIP : Aryanti Dwi Astuti / 19930928 201502 2 002
   Jabatan : Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Nama /NIP : Diska Ramayanti / 19930723 201801 2 002
   Jabatan : Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

akan melaksanakan pemantauan dengan metode Survei atas pelaksanaan Surat Tugas Nomor ST-597/KPP.0303/2024 tanggal 09 Oktober 2024 terkait tindak lanjut SP2DK oleh *Account Representative* KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada:

hari/tanggal : Jum'at/ 25 Oktober 2024
pukul : 09.00 s.d. 15.00 WIB
tempat : Jl Jembatan Musi II RT 026 RW 006, Keramasan, Kertapati Kota Palembang, Sumatera Selatan

Sehubungan dengan pelaksanaan pemantauan tersebut, diminta bantuan Saudara untuk memberikan informasi yang diperlukan. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL**
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

LAPORAN
TENTANG
PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAP PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DENGAN METODE SURVEI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
NOMOR LAP-23/KPP.030301/2024

A. Pendahuluan
   1. Latar Belakang
      a. Membantu pimpinan unit kerja dalam melakukan pemantauan penerapan sistem pengendalian intern yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;
      b. Membantu pimpinan unit kerja dalam meningkatkan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (PER-22) dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
      c. Mendorong terwujudnya sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak agar selaras dengan Kode Etik dan Kode Perilaku;
      d. Mendeteksi dini adanya penurunan penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan (*early warning system*) yang hasilnya akan digunakan manajemen unit kerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
   2. Maksud dan Tujuan

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | | 115,81% | 111,47% | 112,41% | **111,73**% |

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | - | 85% | 111,73% |

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | 85% | - | 111,73% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

1) Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
2) Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
3) Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

   Upaya yang dilakukan adalah membuat survei kepuasan Pelayanan Perpajakan dalam setiap layanan perpajakan.

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Melaksanakan Rapat Monev Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM Triwulan IV Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 2. Menyelenggarakan sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku kepada seluruh pegawai | |
| 3. Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Inspeksi Mendadak | |
| 4. Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Survei | |
| 5. Membuat Nota Dinas Imbauan Pengendalian Gratifikasi pada Momen Hari Raya Tahun 2025 ke seluruh pegawai | |

| | |
|---|---|
| 6. Memasang banner dan spanduk terkait Tolak & Laporkan Gratifikasi pada Momen Hari Raya Tahun 2025 | |
| 7. Memasang banner dan spanduk terkait Anti Gratifikasi | |
| 8. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait layanan kepada Wajib Pajak | |
| 1. Mengumpulkan data nomor telepon dan email responden yang valid dan dapat dihubungi | |

| | | |
|---|---|---|
| **09c-N** | : | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **23%** | **47%** | **47%** | **70%** | **70%** | **90%** | **90%** |
| **Realisasi** | **29,24%** | **49,01%** | **49,01%** | **88,65%** | **88,65%** | **100%** | **100%** |
| **Capaian (Max 120)** | **120,00%** | **104,28%** | **104,28%** | **120,00%** | **120,00%** | **111,11%** | **111,11%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

**A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Struktur UPK-*Three* terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-*Three*;
b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKO UPK-*Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-*Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko**

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | = | Indeks Implementasi Manajemen Kinerja | + | Indeks Implementasi Manajemen Risiko |

- **Realisasi IKU**

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

| Kode IKU | Nama Kanwil | Nama Unit | s.d. Periode | Tahun | Indeks Implementasi Manajemen Kinerja | | | Indeks Implementasi Manajemen Risiko | Realisasi | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Imbauan terkait Manajemen Kinerja | DKRO | Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja | | | | |
| 10c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Palembang Ilir Timur | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Baturaja | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,89 | 50,00 | 99,89 | 90,00 | 110,99% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Lubuk Linggau | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,48 | 50,00 | 99,48 | 90,00 | 110,53% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Pangkal Pinang | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,63 | 50,00 | 99,63 | 90,00 | 110,69% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Tanjung Pandan | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,40 | 50,00 | 99,40 | 90,00 | 110,44% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Palembang Seberang Ulu | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Palembang Ilir Barat | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Madya Palembang | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Lahat | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 13,84 | 50,00 | 98,84 | 90,00 | 109,82% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Kayu Agung | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,10 | 50,00 | 99,10 | 90,00 | 110,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Prabumulih | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,03 | 50,00 | 99,03 | 90,00 | 110,03% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Sekayu | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Bangka | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,70 | 50,00 | 99,70 | 90,00 | 110,78% |

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | | | | 111,11% | 111,11% |

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | - | - | 90% | 111,11% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90% | - | 111,11% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-590/KMK.01/2016.

**P**emantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016.

Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO yang terpenuhi.

Unsur-unsur penilaian DKO adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan rapat, dibuktikan dengan surat undangan dan daftar hadir (10 poin)
2) Apabila DKO dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil) dan tanggal 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 10 poin; Apabila DKO

dilaksanakan setelah tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil) dan 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 5 poin.

3) Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi (dibuktikan dengan foto) (20 poin)
4) Risalah Rapat (10 poin)
5) Matriks Tindak Lanjut sesuai lampiran II KMK-590/KMK.01/2016 (10 poin)
6) Laporan Pemantauan Triwulanan sesuai KMK-845/KMK.01/2016 (10 poin)
7) Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja (20 poin)
8) Tingkat efektivitas waktu Dialog Kinerja kriteria Baik dengan Nilai 75<x<100 (10 poin)

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah:

a. Membuat rencana aksi sesuai dengan tupoksi masing masing seksi; dan
b. Melaksanakan rapat setiap bulan untuk memonitoring capaian NKO dan membahas rencana aksi untuk pencapaian target NKO tersebut.

**6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya**

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| Membuat ND permintaan realisasi kepada Pengampu IKU | Tahun 2025 |
| Membuat ND/Undangan pelaksanaan DKRO | |
| Menyusun laporan DKRO dan Dokumen Pendukung | |
| Mengikuti DKRO Kemenkeu-Two | |

| | |
|---|---|
| Mengirimkan Nota Dinas permintaan usulan profil risiko kepada masing-masing Seksi pemilik proses bisnis | |
| Melakukan pembahasan dengan masing-masing seksi pemilik proses bisnis | |
| Pengiriman konsep Profil Risiko kepada UKI untuk dilakukan reviu | |
| Pembahasan Profil Risiko bersama pimpinan unit kerja | |
| Pengesahan pimpinan unit atas Piagam Manajemen Risiko Unit Kerja | |
| Pengiriman Piagam Manajemen Risiko yang sudah disahkan | |
| Penyampaian Imbauan Kinerja oleh Pimpinan Unit serta Unit Pengelola Kinerja Pegawai | |
| Penyampaian Laporan Imbauan Kinerja oleh Pimpinan Unit serta Unit Pengelola Kinerja Pegawai | |

| | | |
|---|---|---|
| **10a-CP** | : | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran |

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Realisasi** | **100,00%** | **104,13%** | **104,13%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** |
| **Capaian (Max 120)** | **104,71%** | **104,13%** | **104,13%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** | **120,00%** |

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

  Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

  a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

  b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

  Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

**Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0**

| Formula Tw I, dan II |
|---|
| Realisasi IKPA/95,0 |

**Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:**

| Indeks | Kriteria |
|---|---|
| 120 | Realisasi IKPA ≥ 98,00 |
| 100 < X < 120 | 100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98) |
| 100 | Realisasi IKPA = 95 |
| 80 < X < 100 | 80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95) |
| 80 | Realisasi IKPA = 85 |
| 79,9 | Realisasi IKPA < 85 |

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

**Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:**

| Indeks | Kriteria |
|---|---|
| 120 | Realisasi NKA ≥ 95,00 |
| 100 < X < 120 | 100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95) |
| 100 | Realisasi NKA = 91 |
| 80 < X < 100 | 80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91) |
| 80 | Realisasi NKA = 80 |
| 79,9 | Realisasi NKA < 80 |

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output | | | | |
| 1 | 014 | 015 | 560834 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU | Nilai | 100.00 | 100.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 79.86 | 80% | 0.00 | 99.82 |
| | | | | | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 15.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 100.00 | | 99.64 | | | | 100.00 | | | | |

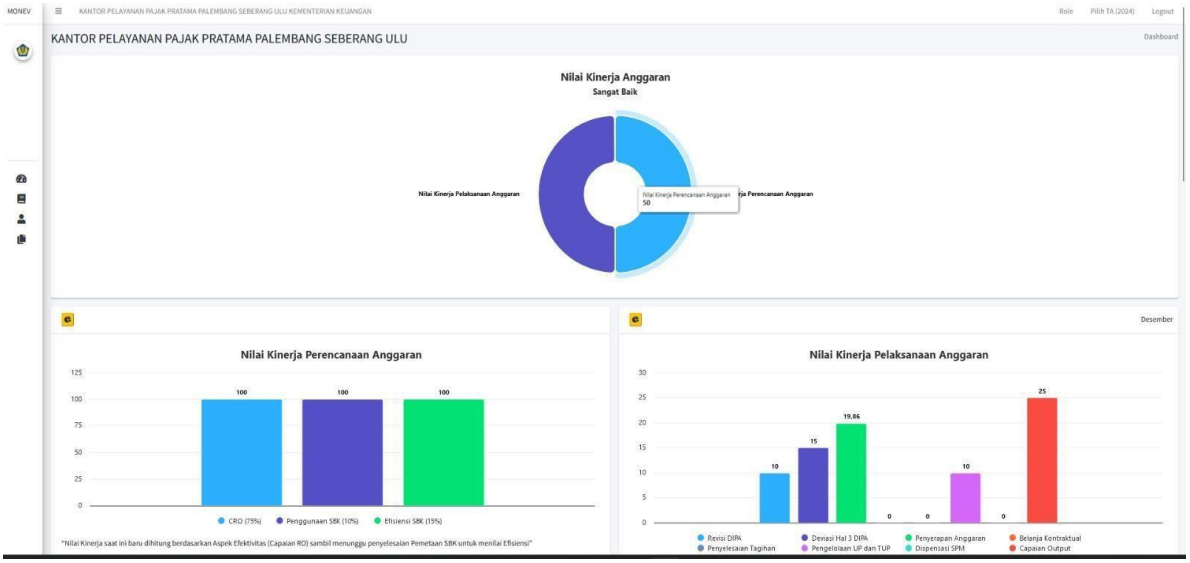


**2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU<br><br>Target | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023<br><br>99,30% | Realisasi Tahun 2024<br><br>120% |
|---|---|---|---|---|---|

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerj | |
|---|---|---|---|---|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Efektivitas Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100% | - | 100% | 120% |

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100% | - | 120% |

**5. Penjelasan dan Analisis atas Pendukung IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

\Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus.Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Terdapat upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target, seperti: Melakukan belanja pegawai dan barang sesuai dengan Rencana Penarikan Hal III DIPA setiap bulannya.

### 6. Rencana Aksi Satu Tahun Selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---|
| 1. Melakukan Rapat Pembahasan Anggaran Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| 2. Melakukan Revisi DIPA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan | |
| 3. Melakukan penyelesaian tagihan tepat waktu dan menghindari dispensasi | |
| 4. Melakukan pengelolaan Uang Persediaan tepat waktu dan akurat | |
| 5. Menginventaris dan Merencanakan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 | |
| 6. Melakukan Pengawasan Pengesahan Revisi Dipa yang membuat target penyerapan anggaran meningkat | |
| 7. Melakukan perhitungan deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dengan melakukan revisi pemuktahiran halaman III DIPA ke Kanwil Perbendaharaan Prov. Sumsel di minggu pertama bulan kedua triwulan I TA 2025 | |

## B. REALISASI ANGGARAN

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu diperoleh dari DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu pada tahun 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.495.345.000,- dengan realisasi DIPA BA Tahun 2024 sebesar Rp. 5.217.923.663,-.

Adapun realisasi anggaran dapat dilihat dalam laporan sebagai berikut :

**Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk**
**Semester Yang Berakhir 31 Desember 2024**
**(Dalam Rupiah)**

| No | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % REALISASI ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BELANJA | | | | |
| I | BELANJA | | | | |
| | TRANSAKSI KAS | 5.495.345.000 | 5.217.923.663 | 277.421.337 | |
| | Belanja Pegawai | 637.630.000 | 599.736.000 | 37.894.000 | 94.06% |
| | Belanja Barang | 4.552.773.000 | 4.318.447.880 | 234.325.120 | 94.85% |
| | Belanja Modal | 304.942.000 | 299.739.783 | 5.202.217 | 98.29% |

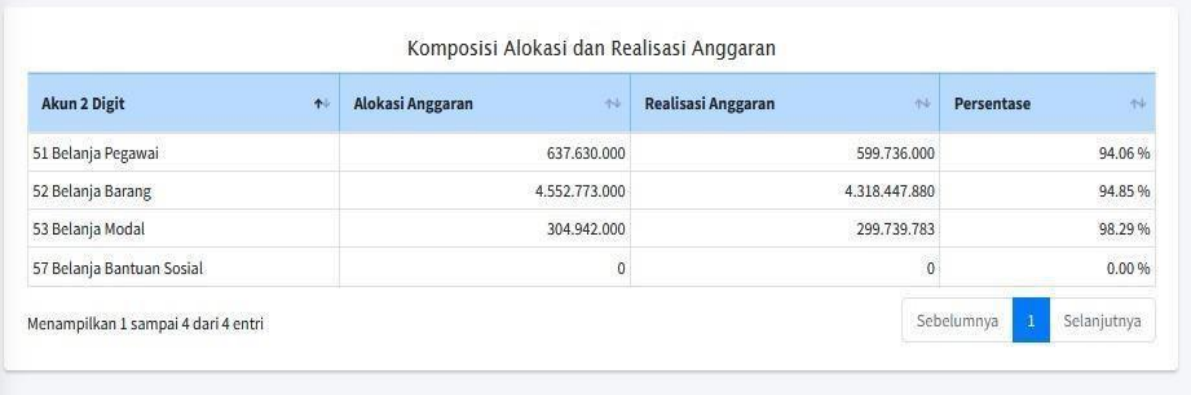

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

| Akun 2 Digit | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|---|---|---|---|
| 51 Belanja Pegawai | 637.630.000 | 599.736.000 | 94.06 % |
| 52 Belanja Barang | 4.552.773.000 | 4.318.447.880 | 94.85 % |
| 53 Belanja Modal | 304.942.000 | 299.739.783 | 98.29 % |
| 57 Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0.00 % |

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

# HITUNGAN NILAI IKKPA TAHUN ANGGARAN 2024

## NAMA SATUAN KERJA : KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

## Nilai IKPA

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output | | | | |
| 1 | 014 | 015 | 560834 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU | Nilai | 100.00 | 100.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 79.86 | 80% | 0.00 | 99.82 |
| | | | | | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 15.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 100.00 | | 99.64 | | | | 100.00 | | | | |

**Nilai Akhir IKPA Berdasarkan Hasil Tangkapan Layar/Screenshot di Atas: 99.82**

**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**

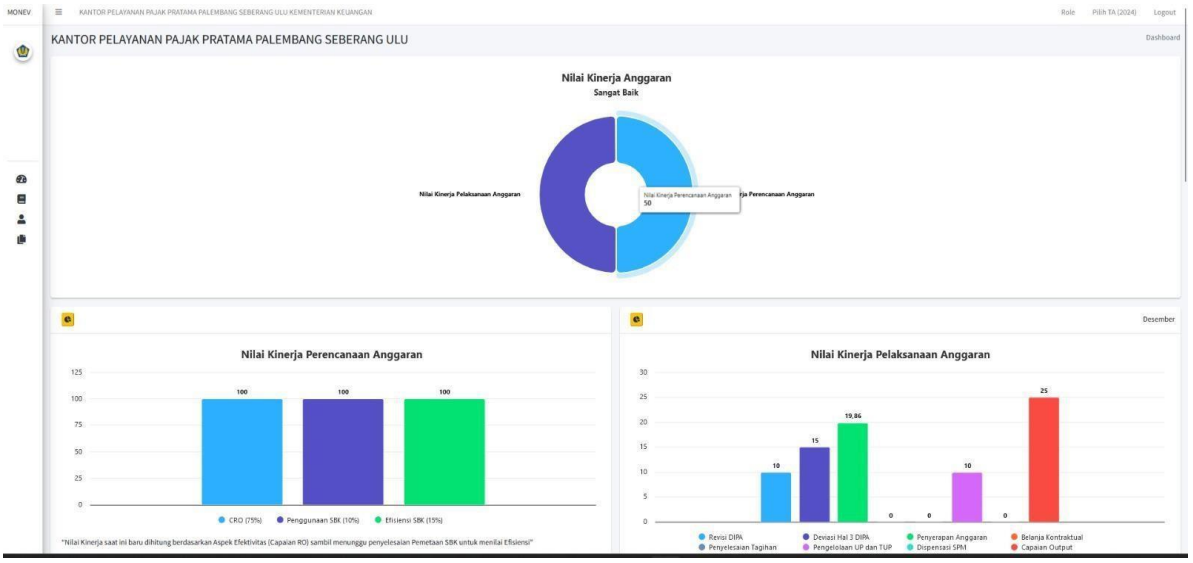


**Nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Berdasarkan Tangkapan Layar/Screenshot di Atas : 100**

## C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu terdiri dari dua (2) jenis sumber daya, yaitu sumber daya pegawai dan sumber daya alat.

Adapun rincian dari jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Jabatan | | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabatan Administrasi | Eselon III | 1 |
| 2 | | Eselon IV | 10 |
| 3 | Jabatan Fungsional | Pemeriksa Pajak | 6 |
| 4 | | Penilai Pajak | 1 |
| 5 | | Penyuluh Pajak | 4 |
| 6 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | Sekretaris | 1 |
| 7 | | Bendahara | 1 |
| 8 | | Pelaksana Kepatuhan Internal | 2 |
| 9 | | Pelaksana Pendukung | 6 |
| 10 | Seksi Penjaminan Kualitas Data | Pelaksana Pendukung | 4 |
| 11 | Seksi Pelayanan | Pelaksana Pendukung | 11 |
| 12 | Seksi Pengawasan | AR Strategis | 4 |
| 13 | | AR Kewilayahan | 18 |
| 14 | | Pelaksana Pendukung | 1 |
| 15 | Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | Juru Sita | 2 |
| 16 | | Petugas Pemeriksa | 0 |
| 17 | | Pelaksana Pendukung | 3 |
| JUMLAH | | | 75 |

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-244/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-212/PJ./2021 tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai pada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan bahwa formasi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Jabatan | | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabatan Administrasi | Eselon III | 1 |
| 2 | | Eselon IV | 10 |
| 3 | Jabatan Fungsional | Pemeriksa Pajak | 7 |
| 4 | | Penilai Pajak | 1 |
| 5 | | Penyuluh Pajak | 5 |
| 6 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | Sekretaris | 1 |
| 7 | | Bendahara | 1 |
| 8 | | Pelaksana Kepatuhan Internal | 2 |
| 9 | | Pelaksana Pendukung | 5 |
| 10 | Seksi Penjaminan Kualitas Data | Pelaksana Pendukung | 4 |
| 11 | Seksi Pelayanan | Pelaksana Pendukung | 9 |
| 12 | Seksi Pengawasan | AR Strategis | 6 |
| 13 | | AR Kewilayahan | 15 |
| 14 | | Pelaksana Pendukung | 3 |
| 15 | Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | Juru Sita | 2 |
| 16 | | Petugas Pemeriksa | 2 |
| 17 | | Pelaksana Pendukung | 3 |
| JUMLAH | | | 77 |

Dapat disimpulkan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut masih terdapat selisih antara formasi dan keadaan sebenarnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Terdapat kelebihan jumlah AR Kewilayahan yang seharusnya 15 pegawai tetapi dalam keadaan sebenarnya ada 18 pegawai, pelaksana pendukung Seksi Pelayanan seharusnya 9 pegawai tetapi dalam keadaan sebenarnya ada 11 pegawai, dan kelebihan jumlah pelaksana pendukung pada Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang seharusnya 5 pegawai tetapi dalam keadaan sebenarnya ada 6 pegawai. Sedangkan terdapat kekurangan pada Penyuluh Pajak, Pemeriksa Pajak, AR Strategis, Pelaksana Pendukung pada Seksi Pengawasan, dan Petugas Pemeriksa pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

| No. | Nama Jabatan | | Jumlah Pegawai Seharusnya | Jumlah Pegawai Sebenarnya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabatan Administrasi | Eselon III | 1 | 1 |
| 2 | | Eselon IV | 10 | 10 |
| 3 | Jabatan Fungsional | Pemeriksa Pajak | 7 | 6 |
| 4 | | Penilai Pajak | 1 | 1 |
| 5 | | Penyuluh Pajak | 5 | 4 |
| 6 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | Sekretaris | 1 | 1 |
| 7 | | Bendahara | 1 | 1 |
| 8 | | Pelaksana Kepatuhan Internal | 2 | 2 |
| 9 | | Pelaksana Pendukung | 5 | 6 |
| 10 | Seksi Penjaminan Kualitas Data | Pelaksana Pendukung | 4 | 4 |
| 11 | Seksi Pelayanan | Pelaksana Pendukung | 9 | 11 |
| 12 | Seksi Pengawasan | AR Strategis | 6 | 4 |
| 13 | | AR Kewilayahan | 15 | 18 |
| 14 | | Pelaksana Pendukung | 3 | 1 |
| 15 | Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | Juru Sita | 2 | 2 |
| 16 | | Petugas Pemeriksa | 2 | 0 |
| 17 | | Pelaksana Pendukung | 3 | 3 |
| JUMLAH | | | 77 | 75 |

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggaran yang ada telah dialokasikan dengan baik untuk kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu seperti jumlah perangkat komputer yang telah memadai bagi

seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Setiap Barang Milik Negara (BMN) yang ada di kantor disalurkan atau digunakan sedemikian rupa agar dana yang digunakan dapat mencukupi satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, sebagian barang yang telah rusak berat dan umur barang sudah memasuki habis pakai, lalu diusulkan penghapusan yang selanjutnya juga sudah dilelang dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## D. KINERJA LAIN-LAIN

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu memperoleh Piagam Penghargaan Juara 2 Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Tahun 2024 Tingkat Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kep. Bangka Belitung.

## E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

**Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Rutin mengadakan Rapat Pembinaan IIb seminggu sekali setiap hari Senin dan Rapat Pembinaan IIc satu bulan sekali pada minggu kedua setiap bulannya;
- Melaksanakan kegiatan *In house Training* mengenai peraturan-peraturan terbaru, penyegaran peraturan lama, isu-isu strategis dan lain-lain untuk meningkatkan kompetensi setiap pegawai;
- Menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait pengelolaan kinerja pegawai dan organisasi;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara berkala, koordinasi setiap seksi untuk percepatan realisasi IKU; dan

  Melaksanakan *Morning Activity* untuk memotivasi dan memperkuat sinergi antar pegawai dan antar seksi.

Evaluasi dapat dilakukan dengan Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. Pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK- 845/KMK.01/2016.

Pada Tahun 2024, secara keseluruhan realisasi pelaksanaan rencana aksi telah mencapai target. Risiko-risiko di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu pun mulai mendekati angka residual harapan serta level resiko juga menurun. Dengan Nilai Kinerja Organisasi yang melebihi 100% dan Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi yang mencapai target, dapat disimpulkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dapat mengelola risiko dengan baik sehingga risiko untuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam mencapai Sasaran Organisasi.

# BAB IV
# PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

## A. KESIMPULAN

Secara umum pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2024 dapat dikatakan sudah optimal karena sudah mampu mengamankan penerimaan kas negara di sektor pajak hal ini dapat dilihat dari capaian persentase penerimaan pajak Negara sebesar 100,54% dan capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110,60%. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

a. Sarana dan prasarana yang perlu ditambah dan diperbaiki secara kuantitatif dan kualitatif.
b. Sumber daya manusia yang lebih sedikit dari jumlah formasi yang seharusnya sehingga beban kerja yang didapat menjadi lebih besar dari seharusnya.
c. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah.
d. Peningkatan kemajuan teknologi informasi.
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompeten dan kompetitif

## B. SARAN

Untuk menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu akan melakukan hal-hal sebagai beirkut :

a. Melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana secara kuantitatif dan kualitatif;
b. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada agar selalu dapat produktif;
c. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui penyuluhan, himbauan, dan pelayanan prima yang lebih baik;
d. Peningkatan kemajuan teknologi informasi melalui pembenahan sistem informasi dan infrastrukturnya serta penyiapan SDM; dan
e. Peningakatan SDM yang lebih kompeten dan kompetitif melalui kegiatan *In House Training, Internal Corporate Value*, dan Diklat.

Dalam pencapaian pelaksanaan kinerja tahun 2024 seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan bahu-membahu sekuat tenaga menyukseskan program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu selaku Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Besar harapan kami untuk mendapatkan umpan balik dari apa yang telah kami laksanakan selama masa dua belas bulan Tahun 2024 sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kinerja pada periode yang akan datang.

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian kinerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, sebagai berikut:

## PERJANJIAN KINERJA
## NOMOR: PK-3/WPJ.03/2024
## KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
## KEMENTERIAN KEUANGAN
## TAHUN 2024

## Peta Strategi

**Visi :**

**Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".**

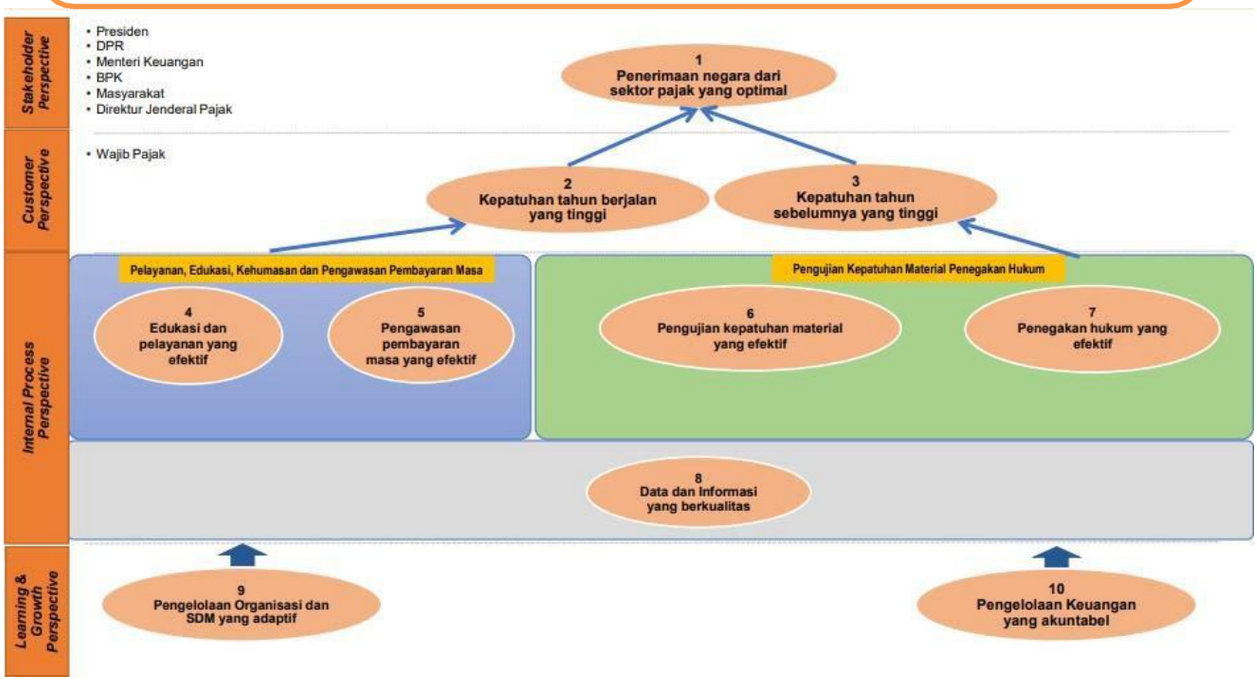

# PERJANJIAN KINERJA
# TAHUN 2024
# KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
# PALEMBANG SEBERANG ULU
# KEMENTERIAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang Efektif | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | 100% |
| | | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100% |
| | | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| | | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% |
| | | 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 |
| | | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| | | 09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

| **Program/ Kegiatan Tahun 2024** | **Anggaran** |
|---|---|
| *C.* Program Pengelolaan Penerimaan Negara | Rp 827.465.000 |
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara | Rp 341.949.000 |
| 2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp 140.069.000 |
| 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum | Rp 345.447.000 |
| *D.* Program Dukungan Manajemen | Rp 3.963.848.000 |
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp 3.324.063.000 |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp 639.785.000 |
| **Total** | **Rp 4.791.313.000** |

**NILAI KINERJA ORGANISASI**
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
**KPP KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**
**TAHUN 2024**

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Stakeholder Perspective* | | | | | | 30,00% | 103,68 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | 103,68 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100,54% | Max | E/L | 26,00% | 57,78% | 100,54 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | 107,98 | Max | P/L | 19,00% | 42,22% | 107,98 |
| | *Customer Perspective* | | | | | | 20,00% | 104,54 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | 105,39 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,43% | Max | E/L | 26,00% | 57,78% | 100,43 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 112,17% | Max | P/L | 19,00% | 42,22% | 112,17 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | 103,68 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 103,68% | Max | E/M | 21,00% | 100,00% | 103,68 |
| | *Internal Process Perspective* | | | | | | 25,00% | 117,66 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | 116,19 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 88,80% | Max | E/M | 21,00% | 50,00% | 120,00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100,00% | 112,38% | Max | E/M | 21,00% | 50,00% | 112,38 |
| 5 | Persentase pengawasan pembayaran masa | | | | | | | 120,00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00% | 115,80% | Max | P/M | 14,00% | 100,00% | 120,00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | 119,43 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 120,00 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 120,00 |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% | 118,31% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 118,31 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | 112,69 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 26,92% | 120,00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75,00% | 102,09% | Max | P/L | 19,00% | 36,54% | 120,00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% | 100,00% | Max | P/L | 19,00% | 36,54% | 100,00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | 120,00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 42,42% | 120,00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% | 83,20% | Max | P/L | 19,00% | 57,58% | 120,00 |
| | *Learning & Growth Perspective* | | | | | | 25,00% | 116,71 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 113,42 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100,00 | 117,47 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 117,47 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00 | 94,97 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 111,72 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90,00 | 100,00 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 111,11 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | 120,00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120,00 | Max | P/M | 14,00% | 100,00% | 120,00 |
| | Nilai Kinerja Organisasi | | | | | | | 110,61 |

*Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB*

## WILAYAH KERJA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

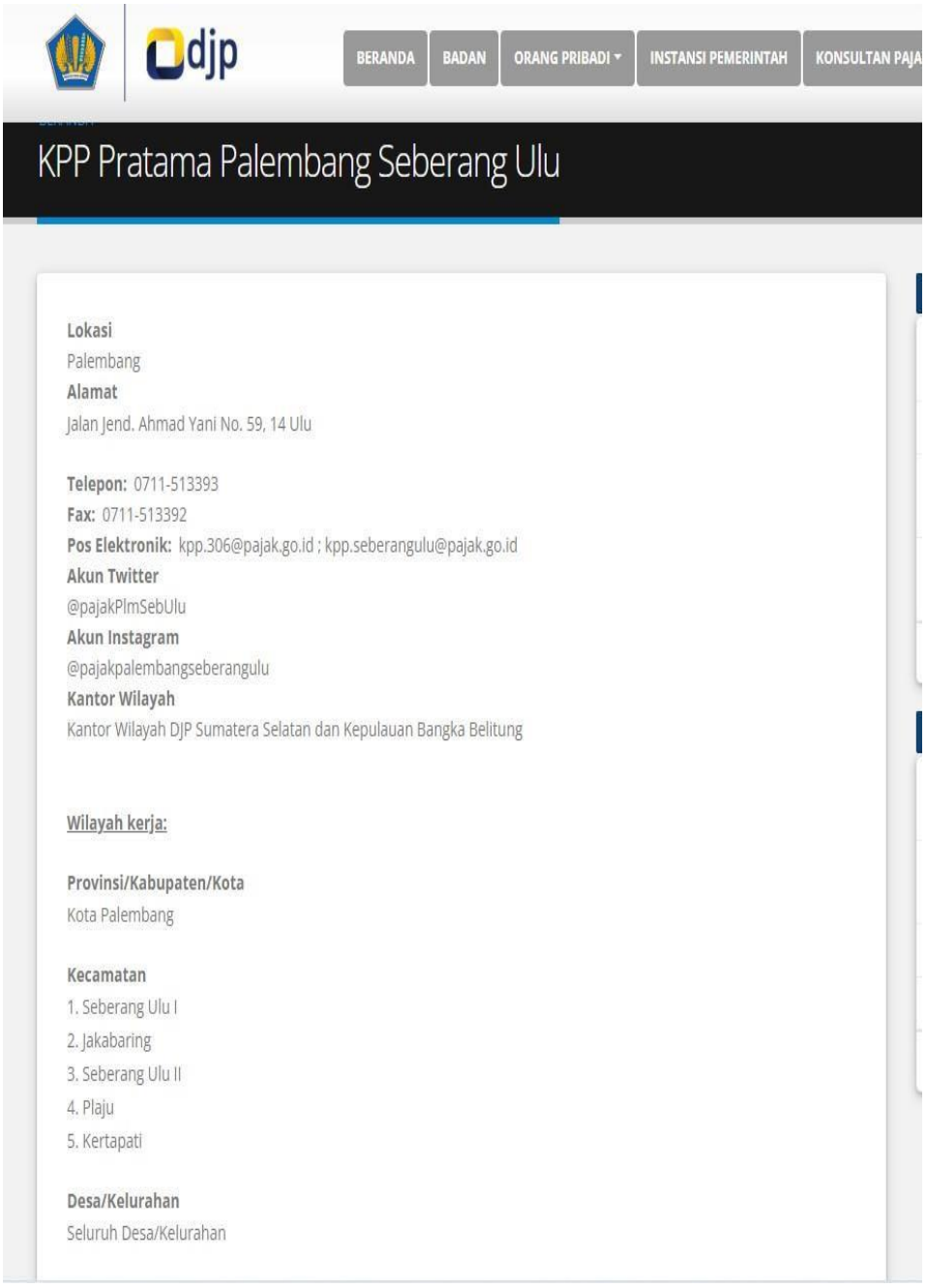

**PIAGAM PENGHARGAAN**
**JUARA 2 KANTOR PELAYANAN PAJAK TERBAIK TAHUN 2024**
**TINGKAT KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BANGKA BELITUNG**